



PUBLICUS: **JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Vol. 1, No. 1, Februari 2023

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WANAKARTA KECAMATAN LOLONG GUBA KABUPATEN BURU

Nurma Hidayati, Zainal Abidin Rengifurwarin, Julia Theresia Patty

1-15

PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

Iriane Sosiawaty Ponto, Pieter Sammy Soselisa

16-22

ANALISIS PELUANG INVESTASI PDAM TIRTA KALWEDO KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Mohammad Soleh

23-35

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Zul Fachry, Zul Fadli, Zul Rachmat, ZH Nurul Kusumawardhani, Nurhidayah

36-41

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DALAM MEMAJUKAN OBJEK PARIWISATA DI NEGERI SULI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Petronela Sahetapy

42-55

IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN BULOVA KOTA MAKASSAR

Ahmad Rosandi Sakir

56-63



Published by:

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pattimura**

PUBLICUS: JURNAL ADMINISRASI PUBLIK

Pengarah

Dr. WAHAB TUANAYA, M.Si.

Penanggung Jawab

Dr. STANISLAUS K. OHOIWUTUN, M.Si.

Editor In Chief

Dr. JOSEP A. UFI, M.A.

Sekretaris Redaksi

JULIA T. PATTY, S.Sos., M.M.

Mitra Bestari

Prof. Dr. MOHAMAD A. RAHAWARIN, M.S. (UNIVERSITAS PATTIMURA)

Prof. Dr. ZAINAL A. RENGIFURWARIN, M.Si. (UNIVERSITAS PATTIMURA)

Prof. Dr. HAEDAR AKIB, M.Si. (UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR)

Prof. Dr. H. IMRAN ISMAIL, M.S. (UNIVERSITAS BOSOWA)

Dr. HENDRY SELANNO, S.Sos., M.Si. (UNIVERSITAS PATTIMURA)

STEFANUS SAMPE, S.Sos., GradDipPubAdmin., MPubPol., Ph.D (UNIVERSITAS SAM RATULANGI)

IDA WIDIANINGSIH, Ph.D (UNIVERSITAS PADJAJARAN)

ERNA HERAWATI, Ph.D (UNIVERSITAS PADJAJARAN)

GABRIEL LELE, Ph.D (UNIVERSITAS GADJAH MADA)

JEANE MANTIRI, S.AB., M.A.P. (UNIVERSITAS NEGERI MANADO)

Dewan Redaksi

Drs. PIETER S. SOSELISA, M.Si.

Dr. AMINAH BAHASOAN, M.Si.

Dr. NORMAWATI, M.Si.

Dr. HENGKY V. R. PATTIMUKAY, S.Sos., M.Si.

IVONNY Y. RAHANRA, M.Teol., M.Si.

LA MADJID, S.Sos., M.Si.

JEANLY WAISAPY, M.Si.

HUMAIRAH ALMAHDALI, S.Sos., M.A.P.

AHMAD ROSANDI SAKIR, S.IP., M.A.P.

MARYAM SALAMPESY, S.Sos., M.Si.

ZUL FADLI, S.E., M.A.P.

Alamat Redaksi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pattimura

Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku

Email: publicus.psap@gmail.com

Terbit Perdana Februari 2023

PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 bisa diterbitkan dengan lancar dan tepat waktu.

PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik merupakan salah satu media publikasi ilmiah yang berfokus pada penelitian dan pengembangan di bidang administrasi publik. Kami mempunyai komitmen untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan inovatif sehingga dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Dalam PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik, para penulis dapat mengeksplorasi berbagai isu yang berkaitan dengan administrasi publik, mulai dari kebijakan publik, manajemen publik, reformasi birokrasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, serta isu-isu terkait dengan etika dan akuntabilitas dalam administrasi publik.

Kami berharap PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai administrasi publik khususnya di Indonesia serta membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi di bidang ini. Kami juga berharap dapat terus menerima dukungan dan kontribusi dari para penulis dan pembaca untuk memajukan bidang administrasi publik.

Terima kasih kepada para penulis dan reviewer yang telah berkontribusi dalam pembuatan jurnal ini, serta terima kasih kepada para pembaca yang telah memberikan dukungan dan apresiasi. Selamat membaca dan semoga artikel-artikel di PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Ambon, 20 Februari 2023

Tim Redaksi

PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

DAFTAR ISI

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WANAKARTA KECAMATAN LOLONG GUBA KABUPATEN BURU <i>Nurma Hidayati, Zainal Abidin Rengifurwarin, Julia Theresia Patty</i>	1-15
PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON <i>Iriane Sosiawaty Ponto, Pieter Sammy Soselisa</i>	16-22
ANALISIS PELUANG INVESTASI PDAM TIRTA KALWEDO KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA <i>Mohammad Soleh</i>	23-35
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Zul Fachry, Zul Fadli, Zul Rachmat, ZH Nurul Kusumawardhani, Nurhidayah	36-41
OPTIMALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DALAM MEMAJUKAN OBJEK PARIWISATA DI NEGERI SULI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH <i>Petronela Sahetapy</i>	42-55
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN BULOVA KOTA MAKASSAR <i>Ahmad Rosandi Sakir, Humairah Almahdali</i>	56-63



**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA WANAKARTA KECAMATAN LOLONG
GUBA KABUPATEN BURU**

***THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE
IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN WANAKARTA VILLAGE,
LOLONG GUBA DISTRICT, BURU REGENCY***

Nurma Hidayati¹, Zainal Abidin Rengifurwarin², Julia Theresia Patty³

^{1,2,3}Universitas Pattimura

²rengifurwarinza58@gmail.com

³juliapatty321@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Wanakarta, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan model interaktif milik milles dan huberman yaitu mengadakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dimensi kinerja pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru berada dalam posisi cukup baik, terutama : a) dimensi produktivitas kerja, b) dimensi responsivitas kerja, c) dimensi akuntabilitas kerja. Kondisi ini didukung oleh faktor : a) tingkat pengetahuan, b) tingkat kemampuan, sedangkan dimensi kinerja pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wanakarta yang belum memadai adalah dimensi tanggung jawab kerja. Kondisi ini terjadi karena kurang memperoleh dukungan dari faktor pendidikan yang dimiliki.

Kata Kunci: kinerja, pemerintah desa, pembangunan desa.

Abstract

This type of research is qualitative descriptive research that aims to determine the performance of village government in development in Wanakarta Village, Lolong Guba District, Buru Regency. The informants in this study amounted to 11 people. Data collection techniques were used in the form of observation, interviews, and documentation, as well as data analysis techniques using interactive models owned by Milles and Huberman, namely conducting data reduction, presenting data, and drawing conclusions. The research results obtained show that village government performance in development prioritizes community aspirations and participation, and the performance dimensions of implementing village development programs in Wanakarta Village, Lolong Guba District, Buru Regency are in a fairly good position, especially: a) work productivity dimensions; b) work responsiveness dimensions; and c) the dimensions of work accountability. This condition is supported by factors: a) level of knowledge; b) level of ability, while the dimension of performance in the implementation of village development programs in Wanakarta Village that is inadequate is the



dimension of work responsibility. This condition occurs due to a lack of support from educational factors.

Keywords: *performance, village government, village development.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu arah perkembangan administrasi publik pada saat ini mengacu pada profesionalisme kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik. Hal ini berorientasi pada fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat sampai daerah. Salah satu Instansi yang dibentuk oleh pemerintah di daerah yaitu desa.

Dewasa ini, kedudukan peranan desa berkembang pesat dan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan negara. Hal ini dikarenakan pada era pemerintahan presiden Joko Widodo, desa dijadikan ujung tombak dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Menurut Sujadi, dkk “istilah desa berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah” sedangkan Hanif Nurcholis dalam Sujadi, dkk mengatakan bahwa: Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dalam mengatur kehidupannya dalam suatu desa diatur oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal (3) dan (4). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Dalam melaksanakan pembangunan maka pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Sebagaimana dikemukakan Fahmi (2013:2) bahwa “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *Profit Oriented* dan *Non Profit Oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.”

Untuk dapat menyelenggarakan pelaksanaan program pembangunan yang prima tidaklah mudah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna melaksanakan program pembangunan yang baik. Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu adanya dukungan dari berbagai faktor baik itu faktor individu maupun faktor kelompok atau organisasi. Pemerintah desa dalam hal ini merupakan organisasi, jadi kinerja pemerintah desa sama dengan kinerja organisasi. Ini berarti bahwa kinerja organisasi merupakan ukuran pencapaian suatu organisasi terhadap visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi sangat dibutuhkan karena jika kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah baik, maka pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dikategorikan baik.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik tentu adanya partisipasi masyarakat yang sadar dan peduli terhadap pentingnya pembangunan khususnya di desa yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat yang lebih baik.

Desa Wanakarta merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru. Desa Wanakarta terletak jauh dari pusat kota. Jarak tempuh dari desa ke kota sekitar 70km/jam dengan mengendarai sepeda motor. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh tani, pedagang dan kuli bangunan.

Berdasarkan observasi awal penulis, pembangunan fisik di Desa Wanakarta masih jauh dari harapan masyarakat. Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa kurangnya pelaksanaan pembangunan jalan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Selain pembangunan jalan, masyarakat juga mengeluhkan tentang pembangunan drainase. Yang mana drainase memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan, seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air, tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada.

- Bidang Pembangunan 2018



No	Jenis Kegiatan	Prakiraan Biaya	Realisasi	Sumber Dana	Ket	Presentase
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton	117,832,800	117,832,800	DD	Dusun Padang Wulan	100%
2	Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong	15,043,400	15,043,400	DD	Dusun Padang Wulan	100%
3	Pembangunan Gorong-gorong	17,987,000	17,987,000	BHR/ BHP	Gedung Serba Guna	100%
4	Kegiatan Perbaikan Saluran Drainase	415,136,400	415,136,400	DD	Dusun Padang Wulan	100%

- Bidang Pembangunan 2019

No	Jenis Kegiatan	Prakiraan Biaya	Realisasi	Sumber Dana	Ket	Presentase
1	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	230.026.800	233.361100	DD	Desa Wanakarta	101,450%
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	73.309.411	69.870.000	DD	Desa Wanakarta	95,3%
3	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	83.454.600	83.088.500	DD	Desa Wanakarta	99,56%
4	Belanja Lampu Jalan Tenaga Surya	141.200.000	141.200.000	DD	Desa Wanakarta	100%

- Bidang pembangunan 2020

No	Jenis Kegiatan	Prakiraan Biaya	Realisasi	Sumber Dana	Ket	Presentase
1	Pembangunan MCK	114.293.000	52.473.000	DD	Desa Wanakarta	45,91%
2	Pembangunan Tempat Wisata Milik Desa	300.864.800	89.604.200	DD	Desa Wanakarta	29,78%
3	Pembangunan Tempat Wisata Milik Desa Tahap II	-	215.237.550	DD	Desa Wanakarta	α
4	Pembangunan Tempat Wisata Milik Desa Tahap III	-	76.703.000	DD	Desa Wanakarta	α

Sumber data: Kantor Desa Wanakarta, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pembangunan desa yang terjadi di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru ini belum sepenuhnya dirasakan, dimana dalam pembangunannya masih tertunda, ini disebabkan cuaca yang tidak menentu dan juga alternatif dari pemerintah desa belum dilakukan dengan baik. Pembangunan yang telah dimulai awal tahun 2018 hingga saat ini belum juga terealisasi penyelesaiannya.

Kinerja pemerintah yang baik sesuai dengan perencanaan dan anggaran tentu diharapkan bagi masyarakat, untuk itu pemerintah desa perlu melakukan perbaikan apabila dalam realisasinya terdapat



permasalahan. Pembangunan yang lambat tentu menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi masyarakat desa, sehingga diperlukan langkah-langkah baik dalam mempercepat pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, gejala-gejala diatas dianggap penting dan menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru”**.

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno Kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Byar dan Rue mendefinisikan kinerja merupakan derajat penyelesaian tugas yang menyertai pekerjaan seseorang. Kinerja adalah yang merefleksikan seberapa baik seseorang individu memenuhi permintaan pekerjaan.

Menurut Notoatmodjo bahwa kinerja tergantung pada kemampuan pembawaan (*ability*), kemampuan yang dapat dikembangkan (*capacity*), bantuan untuk terwujudnya *performance* (*help*), insentif materi maupun nonmateri (*incentive*), lingkungan (*environment*), dan evaluasi (*evaluation*). Kinerja dipengaruhi oleh kualitas fisik individu (ketrampilan dan kemampuan, pendidikan dan keserasian), lingkungan (termasuk insentif dan noninsentif) dan teknologi.

Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Kinerja dimaknai dengan prestasi kerja dalam hal pelaksanaan tugas atau perintah, fungsinya, kewajiban untuk menepati janji serta proses tindakan yang diambil menurut kepuasan batin berdasarkan pikiran bebas pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan kesiapan memikul segala resiko dan konsekuensi (Lexie).

Bernardin dan Russel seperti dikutip oleh Ruky mendefinisikan *performance* sebagai catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dan fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Kinerja dalam konteks prestasi kerja, menurut Gomes adalah suatu hasil yang dicapai sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Sedangkan menurut Siagian bahwa prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku bagi pekerjaan.

Prestasi kerja pegawai negeri sipil adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menyebutkan bahwa pembinaan negeri sipil dilaksanakan berdasarkan system karir dan system prestasi kerja.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kinerja, *performance* atau prestasi kerja adalah penampilan kerja maupun hasil yang dicapai oleh seseorang baik barang/produk maupun berupa jasa yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian atas diri karyawan atau organisasi kerja yang bersangkutan yang mencerminkan pengetahuan karyawan tentang pekerjaannya itu. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas hasil kerjanya maka semakin tinggi pula kinerjanya.

Dalam suatu organisasi terdapat indikator kinerja yang dapat menjadi sumber acuan dari kinerja pegawai. Menurut Sedarmayanti indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun kegiatan selesai dan berfungsi.

Agus Dwiyanto menyebutkan empat indikator untuk menilai kinerja organisasi sektor publik sehingga dapat dideskripsikan bahwa suatu organisasi sektor publik dapat disebut atau dinilai memiliki kinerja tinggi atau kinerja rendah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:



- a. Productivity (produktivitas) adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan sesuai yang diharapkan. Produktivitas merujuk pada hasil kerja dari pelayanan yang diberikan organisasi publik.
- b. Responsiveness (responsivitas) adalah ukuran kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, dengan kata lain responsivitas merupakan daya tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.
- c. Responsibility (responsibilitas) adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan taat kerja yang berlaku.
- d. Accountability (akuntabilitas) adalah ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan sektor publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di dalam dunia kerja, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan maupun dari diri karyawan itu sendiri serta dari lingkungan sekitar perusahaan. Jika kinerja karyawan baik, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih mudah tercapai. Demikian sebaliknya, jika kinerja karyawan buruk, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih sulit tercapai.

Faktor tingkat kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa, oleh para ahli sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Menurut Keith Davis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua, yaitu sebagai berikut: a) faktor kemampuan (ability) dan b) factor motivasi (motivation).

Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, adalah :

1. Faktor kemampuan (Ability)

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan, potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

2. Faktor Motivasi (Motivation)

Motivasi diartikan sebagai sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan, pola kerja dan kondisi kerja.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan pembangunan desa serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru.

b. Manfaat Penelitian



Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis atau akademik dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah referensi mengenai kinerja dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta pengembangan faktor pendukung dan perbaikan faktor penghambatnya di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru pada perpustakaan FISIP Universitas Pattimura.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (input) bagi pemimpin yang berkompeten untuk merumuskan langkah kebijakan bagi upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan desa, serta pengembangan faktor pendukung dan perbaikan faktor penghambatnya di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru.

METODE

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi/tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berlokasi pada Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Wawancara (interiview)

Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Dalam wawancara terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data yaitu:

- Membuat pedoman pertanyaan wawancara, sehingga pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan wawancara tersebut.
- Menentukan narasumber wawancara.
- Menentukan lokasi dan waktu wawancara.Melakukan proses wawancara.
- Dokumentasi.
- Memastikan hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- Merekap hasil wawancara.

2. Observasi (mengamati)

Menurut Riyanto observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif . Dalam kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data.

Berdasarkan jenisnya observasi dibagi 2 (dua) bagian yaitu :

- Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- Observasi tidak langsung adalah pengamatan atau penelitian dilaksanakan pada saat tidak terjadinya suatu peristiwa yang akan diteliti misalnya melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.



3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2000) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, prasasti, notulen, rapor dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa gambar-gambar, foto-foto, dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh objek dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian kualitatif.

Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Penyajiannya memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi metode, reliabilitas serta validitas instrument yang digunakan dalam penelitian. Perlu juga dijelaskan bagaimana ragam populasi yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta proses sampling yang dilakukan.

Penentuan Informan

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan yang ditentukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua macam informan, yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi dan objek penelitian ini yakni : Kepala Desa Wanakarta sebagai informan kunci, sedangkan Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat Umum sebagai informan pendukung.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono). Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

Teknik Analisis Data

Didalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Huberman dan Miles mengajukan tiga model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini, terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman).

1. Reduksi Data

Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data maksudnya ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, pengabstrakan serta informasi data awal yang muncul dari hasil catatan tertulis lapangan.



2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Menarik kesimpulan ialah merupakan proses penjelasan, mencatat keteraturan yang berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Identitas Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari pemerintah desa Wanakarta dan masyarakat di desa Wanakarta.

Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut akan dijelaskan karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah		Frekuensi	Presentase
		Pemerintah Desa	Masyarakat		
1	Laki-laki	3	5	8	73%
2	Perempuan	1	2	3	27%
Total		4	7	11	100

Sumber data: Kantor Desa Wanakarta, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa informan berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 8 orang (73 persen) sedangkan informan berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang (27 persen). Total keseluruhannya adalah 100 persen.

Informan Berdasarkan Usia

Berikut akan dijelaskan mengenai informan berdasarkan usia yang digambarkan pada tabel 4.21 berikut ini.

Tabel 2
Informan Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah		Frekuensi	Presentase
		Pemerintah Desa	Masyarakat		
1	0-30	-	3	3	27%



2	31-40	3	-	3	27%
3	41-50	-	2	2	19%
4	51-60	1	2	3	27%
Total		4	7	11	100

Sumber data: Kantor Desa Wanakarta, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa informan dengan tingkatan umur antara 0-30 tahun berjumlah 3 orang atau 27 persen, informan dengan tingkatan umur antara 31-40 tahun berjumlah 3 orang atau 27 persen, informan dengan tingkatan umur antara 41-50 tahun sebanyak 2 orang atau 19 persen, informan dengan tingkatan umur antara 51-60 tahun sebanyak 3 orang atau 27 persen. Jadi total keseluruhannya ialah 100 persen.

Informan Berdasarkan Agama

Berikut akan dijelaskan jumlah informan berdasarkan agama, yakni sebagai berikut

Tabel 3
Informan Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah		Frekuensi	Presentase
		Pegawai	Masyarakat		
1	Islam	4	7	11	100%
Total		4	7	11	100

Sumber data: Kantor Desa Wanakarta, 2022

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa penduduk dengan agama islam berjumlah 11 orang (100 persen).

Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut akan dijelaskan mengenai informan berdasarkan tingkat pendidikan yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Agama	Jumlah		Frekuensi	Presentase
		Pegawai	Masyarakat		
1	SD	-	2	2	18%
2	SMP/Sederajat	-	1	1	9%
3	SMA/Sederajat	2	2	4	37%
4	Tamat sarjana S1	1	2	3	27%
5	Tamat sarjana S2	1	-	1	9%
Total		4	5	11	100

Sumber Data : Kantor Desa Wanakarta, 2022

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa informan dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat sebanyak 2 orang (18 persen), informan dengan tingkat pendidikan SMP/Sederajat sebanyak 1 orang (9 persen), informan dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 4 (37 persen), informan dengan tingkat pendidikan Sarjana S1 sebanyak 3 orang (27 persen), dan Sarjana S2 sebanyak 1 orang (9 persen). Jadi total keseluruhannya adalah 100 persen.

Kinerja Pembangunan Desa

Berikut ini adalah ulasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan



pembangunan di Desa Wanakarta, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Kinerja Pemerintah Desa merupakan kemampuan kerja Pemerintah Desa.

Data yang berhasil dikumpulkan berkaitan dengan konsep yang dikaji melalui penelitian ini terdiri atas kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Agus Dwiyanto terdapat dimensi-dimensi yang menjadi tolak ukur indikator kinerja, yaitu produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Teori inilah yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Masing-masing konsep tersebut memiliki hasil analisa. Hasil analisa ini dipaparkan secara berurutan, sebagai berikut:

a. Produktivitas

Swastha dan Sukotjo berpendapat bahwa produktivitas adalah sebuah konsepsi yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Selanjutnya menurut Handoko produktivitas didefinisikan sebagai hubungan masukan-masukan dan keluarankeluaran suatu sistem produksi.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien.

Produktivitas pemerintah desa dalam menyelesaikan pembangunan merupakan salah satu dimensi yang paling penting untuk melihat kinerja pemerintah desa. Dalam hal ini produktivitas adalah hasil (output) yang diperoleh dari program pembangunan yang sudah terlaksana di Desa Wanakarta. Setiap pembangunan yang berlangsung di desa Wanakarta merupakan suatu kebutuhan yang betul-betul berasal dari kebutuhan masyarakat dan prioritas kegiatan baik dalam penggunaan dan manfaatnya.

Untuk menyelesaikan suatu kegiatan pembangunan di Desa Wanakarta, pemerintah desa Wanakarta dan masyarakatnya mengaku bahwa dalam menyelesaikan pembangunan pemerintah desa Wanakarta selain berusaha mengoptimalkan waktu bekerja oleh pekerja di lapangan sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja, dari pemerintah desa sendiri mengajak masyarakat bekerja sama dalam hal swadaya menyelesaikan suatu kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya masyarakat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu.

Dari hasil pendekatan wawancara pada indikator produktivitas pemerintah sudah cukup baik yang mana merupakan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan di desa Wanakarta. Jika kemampuan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan sudah sangat baik maka masyarakat akan menilai kinerja pemerintah desa sudah baik. Para pemerintah desa dikatakan sudah cukup baik dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan desa.

b. Responsivitas

Pemerintah desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan. Kemudian kewajiban dari pemerintah desa itu sendiri adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam menindaklanjuti sebuah aspirasi itu adalah dengan, menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke dalam program khususnya dalam pembangunan.

Sikap daya tanggap merupakan hal yang harus dianggap penting. Sebab dengan adanya daya tanggap yang baik masalah akan mampu terselesaikan dan dapat menciptakan kualitas layanan yang baik. Sikap daya tanggap haruslah dimiliki oleh para penyelenggara pelayanan agar terciptanya akuntabilitas pada pelayanan publik.

Dari hasil pendekatan wawancara pada indikator Responsivitas di atas, Responsivitas pemerintah desa terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam menerima aspirasi dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada indikator responsivitas pemerintah desa sudah cukup baik dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Namun sebelum menerima aspirasi masyarakat tentunya melewati proses menjangkau aspirasi masyarakat. Pemerintah desa harus sigap setiap



waktu, demikian yang dilakukan pemerintah desa Wanakarta. Selain menerima aspirasi masyarakat, pemerintah desa Wanakarta mengambil kebijakan untuk mengerahkan masing-masing ketua rukun tetangga (RT) untuk menggali aspirasi masyarakat di RT sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pembangunan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di wilayah RT masing-masing.

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa, dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, Pemerintah Desa Wanakarta tidak semata-mata hanya melihat dari aspirasi langsung bisa dituangkan kedalam program pembangunan yang ada, tetapi dengan cara menentukan prioritas program akan menghasilkan program yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa.

c. Responsibilitas

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah desa khususnya dalam pembangunan, responsibilitas pemerintah desa merupakan tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan mengenai kemampuan dalam memberikan informasi mengenai program-program pembangunan hingga proses penetapan program-program kerja dalam pembangunan desa.

Maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang di dalam pembangunan. Tugas dan fungsi pemerintah desa di dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa sendiri. Menurut aparat pemerintah Desa Wanakarta dari pemerintah desa sendiri memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan suatu kegiatan karena dengan cara itu tidak akan terjadi tumpang tindih masalah tanggungjawab yang sudah dibebankan kepada pemerintah desa.

Pada Pemerintah Desa Wanakarta di dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembangunan sendiri setiap unsur pemerintahan desa berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka sebaik mungkin sehingga pada saat diminta tanggungjawab atas kepercayaan yang diberi khususnya dalam pembangunan maka setiap unsur pemerintahan bisa menunjukkan bagian-bagian yang dikerjakannya.

Pada indikator Responsibilitas belum terpenuhi secara maksimal karena kemampuan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai program-program pembangunan belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat.

d. Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas menurut Astuti Dan Yulianto adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kemudian Miriam mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi kuasa atau mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi Dalam konteks pemerintahan Desa, salah satu tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan. Dalam menjalankan tugas tersebut, diharapkan memegang prinsip keterbukaan, ketanggapan, kreatifitas dan akuntabilitas dalam pelayanan dari segenap jajaran aparatur pemerintah desa.

Pemerintah desa bertanggungjawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur pemerintah desa yang dibebankan sebagai wujud tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap pemerintah desa.



Melakukan pekerjaan terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di desa baik pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah desa khususnya dalam pembangunan, dalam indikator akuntabilitas disini dimaksud dengan tanggungjawab baik dari pemerintah desa itu sendiri hingga pada warga masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ada indikator akuntabilitas dapat dilihat baik dari masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama menunjukkan tanggungjawab dan dan konsisten dalam melaksanakan program-program pembangunan yang ada.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan pembangunan di sebuah desa tentu akan terdapat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut.

Menurut Keith Davis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua, yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor kemampuan yaitu pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ *superior*, *very superior*, *gifted* dan *genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, sehingga akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. Sedangkan faktor motivasi diartikan sebagai sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya.

Adapun faktor pendukung dan penghambat yang ada pada pelaksanaan pembangunan di desa Wanakarta adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan menurut Lestari dalam Wirawan adalah merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisasi.

Indikator tingkat pendidikan menurut Lestari dalam Edy Wirawan, yaitu :

1. Pendidikan Formal Indikator nya berupa pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh setiap pekerja yang meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan perguruan tinggi.
2. Pendidikan Informal Indikator nya berupa sikap dan kepribadian yang dibentuk dari keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat.

b. Tingkat Pengetahuan

Pada faktor pengetahuan yaitu dimana tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah desa mengenai tujuan dan sasaran program-program pembangunan di desa Wanakarta. Apabila masyarakat dan pemerintah desa tidak memiliki pengetahuan akan tujuan dan sasaran pembangunan, maka program-program pembangunan tidak akan terlaksana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pemerintah desa sudah sangat baik. Pemerintah desa dalam menyusun program-program pembangunan selalu melibatkan semua elemen yang ada di desa, sehingga masyarakatnya mampu mengetahui dan memahami sasaran serta tujuan dari program-program pembangunan yang ada.

c. Tingkat Kemampuan

Faktor berikut yaitu faktor kemampuan, yaitu kemampuan pemerintah desa Wanakarta dalam menggerakkan masyarakat untuk turut serta melaksanakan program-program pembangunan di desa. Kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai sangatlah dapat mempengaruhi kinerja dalam



pelaksanaan pembangunan, para pegawai pemerintah desa dan masyarakat harus memiliki kemampuan yang baik didalam proses pelaksanaan pembangunan desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, pada faktor kemampuan baik kemampuan pemerintah desa hingga masyarakatnya cukup menunjang keberhasilan dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Artinya baik pemerintah desa maupun masyarakat mampu melaksanakan program-program pembangunan tersebut.

d. Pola Kerja

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa serta sekretaris desa dapat dilihat bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan tidak menggunakan pola-pola kerja tertentu, melainkan dalam pelaksanaannya pemerintah mengikuti berdasarkan jobdesk yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian lapangan yang telah ditampilkan diatas, maka tampak dengan jelas bahwa dimensi kinerja pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru berada dalam posisi cukup baik, terutama : a) dimensi produktivitas kerja, b) dimensi responsivitas kerja, c) dimensi akuntabilitas kerja. Kondisi ini didukung oleh faktor : a) tingkat pengetahuan, b) tingkat kemampuan, dan c) Pola Kerja.

Sedangkan dimensi kinerja pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru yang belum memadai adalah dimensi responsibilitas kerja. Kondisi ini terjadi karena kurang memperoleh dukungan dari faktor pendidikan yang dimiliki.

Dengan demikian hasil temuan dari pelaksanaan penelitian ini dalam mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Saifudin Jambi (2019), Sofyan Torau (2019), Maya Onibala (2018) dan Maya Rosalina (2018), yang pada intinya mengungkapkan bahwa tingkat kinerja pelaksanaan pembangunan di suatu desa dapat dilihat dari : a) dimensi produktivitas, b) dimensi responsivitas, c) dimensi akuntabilitas, dan d) dimensi responsibilitas. Yang mana dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yaitu : a) tingkat pengetahuan, b) tingkat kemampuan, c) pola kerja, dan d) tingkat pendidikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan hasil peneliti mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, maka ditemukan beberapa kesimpulan khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Produktivitas Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Pembangunan, di Desa Wanakarta pemerintah desa betul-betul melihat dari segi kebutuhan bukan keinginan, penggunaan dan manfaat bagi masyarakat sudah cukup baik. Untuk kegiatan lapangan pemerintah desa. Jika ada kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya maka pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan program pembangunan.
- b. Responsivitas Pemerintah Desa Wanakarta dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Aspirasi akan ditindaklanjuti dalam musrenbang desa untuk diusulkan dalam program pembangunan di desa tidak serta merta semua aspirasi bisa masuk kedalam program pembangunan karena aspirasi akan dinilai dari segi kebutuhan masyarakat bukan dari keinginan yang kemudian menjadi prioritas pembangunan di desa. Pemerintah Desa Wanakarta sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas, wewenangnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bukti kinerja Pemerintah Desa mengutamakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di desa.



- c. Responsibilitas pada desa Wanakarta belum terpenuhi secara maksimal karena para pemerintah desa dalam memberikan informasi belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat.
- d. Akuntabilitas pada desa Wanakarta dapat dilihat baik dari masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama menunjukkan tanggungjawab dan dan konsisten dalam melaksanakan program-program pembangunan yang ada.

Dalam pelaksanaan pembangunan di sebuah desa tentu akan terdapat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang ada pada pelaksanaan pembangunan di desa Wanakarta adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan faktor tingkat pendidikan menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat.
- b. Tingkat pengetahuan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta pemerintah desa sudah sangat baik. Pemerintah desa dalam menyusun program-program pembangunan selalu melibatkan semua elemen yang ada di desa, sehingga masyarakatnya mampu mengetahui dan memahami sasaran serta tujuan dari program-program pembangunan yang ada.
- c. Tingkat kemampuan, kemampuan yang dimiliki pemerintah desa hingga masyarakatnya cukup menunjang keberhasilan dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Artinya baik pemerintah desa maupun masyarakat mampu melaksanakan program-program pembangunan tersebut.
- d. Pola kerja, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa serta sekretaris desa dapat dilihat bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan tidak menggunakan pola-pola kerja tertentu, melainkan dalam pelaksanaannya pemerintah mengikuti berdasarkan jobdesk yang ditetapkan oleh pemerintah.

Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan yang di paparkan diatas, maka dapat dikemukakan sejumlah saran dan rekomendasi penelitian sebagai berikut :

- 1. Diharapkan kepada kepala desa atau pimpinan yang berkompeten dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat kinerja pelaksanaan program pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, terutama dari dimensi: 1) produktivitas kerja, 2) responsivitas kerja, 3) responsibilitas kerja, dan 4) akuntabilitas kerja.
- 2. Untuk lebih meningkatkan tingkat kinerja pelaksanaan program pembangunan desa seperti dikemukakan diatas, maka beberapa hal yang perlu ditempuh dan dilakukan adalah: a) mendorong peningkatan tingkat pendidikan warga masyarakat kedepan, b) peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai teknis dan totalitas kerja yang dibutuhkan, c) peningkatan tingkat kemampuan atau kapasitas kerja warga masyarakat melalui pelibatan melalui bimbingan dan penyuluhan, dan d) peningkatan pengembangan pola kerja yang produktif bagi warga masyarakat desa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Borni Kurniawan, desa Mandiri, desa Membangun, Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Fauzi Akhmad dan Rusdi Hidayat Nugroho, 2020. Manajemen Kinerja, Airlangga University Press, 2020.
- Irfan, 2019. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.



- Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Unpatti, 2019. Pedoman Penulisan Skripsi, Pattimura University Press, Ambon.
- Maya Onibala, 2018. Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso, Jurnal program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Maya Rosalina, 2018. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sofyanto Torau, 2019. Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur.

Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 23 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa

Internet

Kusnendar, 2018. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, (<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1661>, diakses 20 Februari 2022).

HA GINTING, 2019. Kinerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Lau Cimba Kabanjahe, (<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/168/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada 20 Februari 2022)

Universitas Medan Area, 2020. BAB II LANDASAN TEORI, (http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1284/5/118320089_file5.pdf, diakses pada 26 Februari 2022)

Abdul Rasyid, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Pola Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Tata Usaha Smpn Di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, (<https://media.neliti.com/media/publications/138182-ID-pengaruh-gaya-kepemimpinan-dan-pola-kerj.pdf>, diakses pada 28 Februari 2022)

Riadi, Muchlisin. (2020). Penilaian Kinerja (Pengertian, Tujuan, Kriteria dan Metode). Diakses pada 7/16/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/03/penilaian-kinerja-pengertian-tujuan-kriteria-dan-metode.html>





**PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA
PEGAWAI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
AMBON**

***THE INFLUENCE OF JOB PLACEMENT ON EMPLOYEE
PERFORMANCE IN AMBON CITY GENERAL ELECTION
COMMISSION OFFICE***

Iriane Sosiawaty Ponto¹, Pieter Sammy Sospelisa²

^{1,2}Universitas Pattimura

¹iriane.ponto20@gmail.com

²soselisapieter5@gmail.com

Abstrak

Tercapainya tujuan organisasi ditentukan oleh kinerja dari anggota organisasi atau pegawainya, dan kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh bagaimana penempatan pegawai di tempat yang tepat dan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pengetahuan, ketrampilan, kemampuan serta kompetensi yang dimilikinya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan menggunakan indikator Prosedur Penempatan, Pengetahuan, Ketrampilan, Kemampuan dan Sikap sebagai variabel bebasnya serta Indikator kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi sebagai variabel terikat, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dari hasil dan pembahasan yang dalam dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai seharusnya memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi berupa pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan serta menunjukkan sikap toleran dari pegawai dalam melaksanakan tugas, demikian pula dengan kinerja organisasi sangat ditentukan oleh capaian-capaian yang dihasilkan melalui kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi yang dimiliki oleh pegawai. Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai target yang sudah ditentukan terutama berkaitan dengan waktu penyelesaiannya, sebab di Lembaga ini seluruh tahapan pelaksanaan telah diatur sedemikian rupa dan sangat tegas dan jelas agar semua dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Penempatan Kerja, Kinerja

Abstract

The achievement of organizational goals is determined by the performance of members of the organization, or employees, and employee performance is strongly influenced by how employees are placed in jobs that are in accordance with their background knowledge, skills, abilities, and competencies. This paper aims to describe how much influence work placement has on employee performance at the Ambon City General Election Commission office using the indicators of placement procedure, knowledge, skills, capabilities, and attitudes as independent variables and indicators of work quality, punctuality, initiative, ability, and communication as dependent variables, using descriptive quantitative research methods. From the results and in-depth discussion, it can be concluded that the placement of employees should pay attention to the suitability between organizational needs in the form of knowledge, skills, and abilities as well as showing a tolerant attitude



of employees in carrying out tasks. Organizational performance is largely determined by the achievements produced through work quality, timeliness, initiative, ability, and communication possessed by employees. The work carried out must be according to the target that has been determined, especially with regard to the time of completion, because in this institute all stages of implementation have been arranged in such a way and are very firm and clear so that everything can be completed according to the time specified.

Keywords: job placement, performance

PENDAHULUAN

Menempatkan orang yang tepat pada bidang yang yang tepat merupakan hal yang sangat penting yang tidak bisa dihindari oleh suatu organisasi yang mengembangkan diri sesuai kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak. Sejak merencanakan pembentukan sebuah organisasi, saat itu pula sumberdaya manusia memerankan peranannya sebagai sumber utama yang akan menggerakkan roda organisasi sekaligus fokus utama dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks dewasa ini, sumberdaya manusia adalah penentu kemajuan sebuah organisasi. Kinerja individu dan organisasi haruslah beriringan dengan kinerja organisasi artinya dari hasil kerja individu akan menentukan hasil kerja atau performance suatu organisasi yang didalamnya manusia-manusia tersebut sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penempatan kerja yang sesuai dengan bidang pengetahuan, ketrampilan, kemampuan serta bagaimana seseorang atau pegawai bersikap dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya adalah modal utama yang akan menentukan keberhasilan suatu organisasi dan perkembangannya dikemudian hari. Proses penempatan dan kompetensi manusia yang ada didalamnya yang biasanya disebut pegawai/ staf atau pekerja, yang akan melakukan tugas pokok, fungsi, kewenangan kewajiban dan tanggungjawab yang melekat padanya.

Beberapa langkah atau tahapan yang sangat dibutuhkan dalam menjaring tenaga kerja/pegawai yang berkompeten semestinya dimulai dengan proses pengadaan atau penempatan kerja yang benar sesuai kebutuhan organisasi sehingga tujuan yang ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai dengan maksimal, sebab jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam proses rekrutmen akan berpengaruh terhadap jalannya aktifitas /kegiatan yang akan berlangsung.

Selain penempatan kerja, satu hal yang tak kalah pentingnya yang turut menentukan keberhasilan organisasi dalam menjawab tuntutan perkembangan dimasa kini dan akan datang yang harus mampu bertahan bahkan bersaing dalam menunjukkan kinerjanya adalah bagaimana kompetensi dari karyawan yang mengisi jabatan-jabatan atau yang membidangi posisi-posisi yang tertentu, maka kedua hal diatas menjadi pokok bahasan yang terus-menerus didengungkan sebab untuk mencapai kinerja yang baik hanya sumberdaya manusia yang telah melewati seleksi yang baik dan benar saja yang dapat dipertahankan oleh suatu organisasi yang ingin mendapatkan penilaian baik dari publik yang bergerak terus dalam lingkup pelayanan yang terarah, konsekwen dan bertanggungjawab serta terukur.

Lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan Umum yang didirikan sejak Tahun 1998 ini seharusnya memiliki kriteria-kriteria khusus selain kriteria-kriteria pada umumnya. Lembaga ini dipercayakan oleh negara ini untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, lembaga ini terus berkembang, menyesuaikan dan menyempurnakan dirinya sebagai lembaga yang dibentuk pada era reformasi adalah lembaga yang sangat dapat diukur kinerjanya, lembaga ini berkerja dalam tahapan-tahapan yang akan menentukan berhasil tidaknya sebuah keberlangsungan perhelatan kenegaraan seperti : Pemilihan Umum (Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden) dan DPRD secara nasional, Pemilihan Kepada Daerah baik Gubernur maupun Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota), kedua; kebutuhan sumberdaya manusia yang mampu menguasai Informasi Teknologi karena hampir semua bagian terhubung dengan aplikasi (tersistem).

Oleh sebab itu proses penempatan kerja para pegawai merupakan hal sangat penting untuk diperhatikan, pada sisi yang lain kinerja pegawai sangat ditentukan oleh sejauhmana pegawai dapat



melakukan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan efektif serta menampilkan kinerjanya dengan baik sebab kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja manusia yang ada didalamnya.

Lembaga ini memerlukan tenaga kerja yang baik dan handal, siap bekerja penuh waktu, penguasaan informasi teknologi sangat dibutuhkan tanpa menafikkan bahwa memang ada yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya namun jika diamati secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Dengan adanya proses penempatan kerja pegawai yang sesuai aturan yang berlaku maka lembaga ini akan mampu menunjukkan kinerjanya yang baik pula.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Selain itu jenis penelitian ini akan menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu variable. Penelitian ini adalah suatu proses menemukan data berupa angka sebagai alat analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram. 2008) penelitian ini bersifat diskriptif untuk mendiskripsikan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui antara penempatan kerja terhadap kinerja pegawai. Variabel penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai adalah penempatan kerja (x) dan kinerja pegawai (y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) Variabel yaitu : Penempatan Kerja sebagai variable (x) dan Kinerja Pegawai sebagai variable (y). Untuk mengukur variabel penempatan kerja diturunkan beberapa alat ukur atau indikator sebagai berikut: 1. Prosedur Penempatan, 2. Pengetahuan, 3. Ketrampilan, 4. Kemampuan, 5. Sikap. Indikator yang dipilih dengan mempertimbangkan bahwa penempatan kerja yang sesuai menjadi ukuran terhadap keberhasilan kerja organisasi. Sedangkan variable (y) yaitu Kinerja pegawai mengarah kepada suatu keadaan yang menunjukkan bahwa proses dan hasil kerja pegawai dapat dicapai sesuai tujuan yang ditentukan sebelumnya bahkan dapat ditingkatkan dan sebaliknya kinerja pegawai ditentukan pula oleh kesesuaian antara penempatan kerja dengan ketersediaan sumberdaya suatu organisasi. Untuk mengukur variabel Kinerja Pegawai diturunkan indikator sebagai berikut : 1. Kualitas Kerja, 2. Ketepatan Waktu, 3. Ketrampilan, 4. Kemampuan dan 5. Komunikasi.

Penempatan Kerja

Menurut Siagian, penempatan merupakan akhir dari proses seleksi. Menurut pandangan ini, jika seluruh proses seleksi telah ditempuh dan lamaran seseorang telah diterima, akhirnya seseorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pula.

1. Prosedur Penempatan:

Pertanyaan yang diajukan; apakah setiap organisasi yang ingin mendapatkan sumberdaya manusia untuk menempati bidang tertentu sebaiknya harus melalui proses tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperoleh jawaban setuju sebanyak 14 (empat belas) atau 100% responden. Prosentase ini mendandakan bahwa seluruh responden yang berjumlah 14 orang memilih ya sesuai, sedangkan terhadap pertanyaan kedua, apakah menurut Bapak/Ibu, proses proses penempatan sumberdaya manusia telah dilakukan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan: dari 14 (empat belas) atau 100% responden yang menjawab Ya, sesuai sebanyak 10 atau 71,42% responden dan 4 (empat) atau 28,57% & responden menjawab belum sesuai.

2. Pengetahuan



Pada pertanyaan dengan Indikator pengetahuan, terhadap pertanyaan yang diajukan pada indikator pengetahuan pengetahuan terkait bidang tugas yang dikuasai akan mendapatkan sumberdaya manusia yang handal dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya diperoleh jawaban ya, setuju sebanyak 14 (empat belas) atau 100% responden, ini menandakan responden sangat mengerti bahwa faktor pengetahuan termasuk salah satu faktor yang penting atau urgen dan berpengaruh dalam penempatan pegawai, maka keseluruhan responden menjawab. Sedangkan terhadap pertanyaan kedua; apakah semua syarat telah dipenuhi dalam mendapatkan sumberdaya manusia yang sesuai kebutuhan sesuai? 9 (sembilan) atau 64, 28% responden menjawab ya, sesuai dan 5 (lima) atau 35% responden menjawab belum sesuai dengan kebutuhan.

3. Keterampilan

Ketrampilan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam penempatan pegawai diperoleh jawaban ya, setuju sebanyak 14 (empat belas) atau 100% responden ini menggambarkan bahwa seluruh responden yang berjumlah 14 orang memilih ya setuju, sedangkan terhadap pertanyaan kedua apakah proses pegawai yang ditempatkan telah sesuai atau memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dari 14 (empat belas) responden yang menjawab sesuai sebanyak 10 (sepuluh) atau 71,43 % responden dan 4 (empat) atau 28,57 responden menjawab keterampilan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

4. Kemampuan

Terhadap pertanyaan yang diajukan pada indikator ke 4 (empat) yakni kemampuan, pada prinsipnya kemampuan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pegawai terkait dengan bidang tugasnya, seluruh responden yang menganggap bahwa kemampuan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang terkait bidang yang ditekuninya, sedangkan terhadap pertanyaan apakah bidang pekerjaan yang ditekuni mencerminkan bahwa mereka bertanggungjawab dan telah sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, sebanyak 8 atau, 57, 14 % responden yang menjawab tidak sesuai, 2 (dua) atau 12, 28% responden menjawab sesuai, sedangkan 4 (empat) atau 28,57% responden menjawab tidak tahu.

5. Sikap

Sikap merupakan bagian yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam menjalankan perintah atau aturan maupun tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Jawaban responden secara keseluruhan atau 100 % mampu menunjukkan sikap yang toleran walau harus berhadapan dengan tugas rutin yang membosankan dan berusaha menunjukkan dedikasi yang tinggi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demikian pula dengan pertanyaan apakah bidang pekerjaan yang ditekuni mencerminkan bahwa mereka bertanggungjawab dan telah sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, dari responden yang berjumlah 14 orang, sebanyak 12 (duabelas) orang atau 85,71% responden menjawab ya, mampu menunjukkan sikap toleran dan 2 (dua) responden atau 14, 29% menjawab tidak tahu.

Kinerja

Untuk mengatur Kinerja Pegawai, Mitchel dalam buku Sedarmayanti (2001:51) yang berjudul Sumberdaya Manusia dan Produktifitas Kerja mengemukakan indikator kinerja sebagai berikut: 1. Kualitas kerja (quality of work) 2. Ketepatan Waktu (Promptness) 3. Inisiatif (Initiative) 4. Kemampuan (Capability) 5. Komunikasi (Communication), maka dalam penelitian ini ke 5 (lima) indikator ini dirasa sangat cocok untuk mengukur tingkat tingkat capaian kinerja pada lokasi penelitian ini.

1. Kualitas Kerja (quality of work)

Jawaban responden terhadap indikator kualitas kerja sebagai salah satu bagian yang menentukan keberhasilan organisasi, diperoleh jawaban ya, setuju sebanyak 12 (dua belas) orang atau 85,71 % responden. Sedangkan terhadap indikator yang sama 2 (dua) atau 14,28 responden menjawab tidak tahu. Sedangkan untuk pertanyaan terhadap keberhasilan lembaga ini menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya, 7 (tujuh) orang atau 50,00 % responden menjawab ya, telah sesuai, 3 (tiga) orang atau 21, 43 % menjawab tidak sesuai, serta 4 (empat) orang atau 28, 57 % responden menjawab tidak tahu.



2. Ketepatan Waktu (promptnees)

Jawaban responden terhadap indikator ketepatan waktu dalam penyelenggaraan suatu kegiatan salah satu hal yang tak kalah pentingnya dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan menunjukkan keseluruhan atau 14 (empat belas) orang setuju bahwa ketepatan waktu sangat penting dalam penyelesaian pekerjaan, sedangkan untuk pertanyaan, apakah dalam pelaksanaan suatu kegiatan sering menemui kendala tertentu sehingga pekerjaan tidak dapat terselesaikan tepat waktu, dari 14 (empat belas) responden sebanyak 8 (delapan) atau 57,14% responden memilih jawaban ya, 4 (empat) orang responden atau 28,57% menjawab kadang-kadang dan 2 (dua) responden atau 14,29% memilih jawaban tidak tahu.

3. Inisiatif (Initiative)

Inisiatif merupakan salah satu indikator yang dibutuhkan sebagai solusi dalam keadaan yang mendesak dan penting. Jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan pada indikator inisiatif tertentu sebagai solusi dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak dan penting harus ditempuh, menunjukkan 10 (sepuluh) orang atau 71,42% responden yang menyatakan setuju, 2 (dua) atau 14,29% responden menjawab tidak setuju, dan 2 (dua) atau 14,29% responden memberi jawaban tidak tahu. Untuk pertanyaan lanjutan berkaitan dengan inisiatif dalam mengambil langkah tertentu jika hal itu penting dan mendesak sehingga harus segera menemukan jalan keluar, jawaban responden menunjukkan 8 (delapan) atau 57,14% responden menjawab ya, selalu menginisiasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, sementara 3 (tiga) atau 21,43% responden menjawab tidak selalu dan 3 (tiga) atau 21,43% responden menjawab tidak tahu.

4. Kemampuan (Capability)

Pernyataan bahwa kemampuan adalah hal yang wajib dimiliki oleh seseorang karyawan agar tugas dan pekerjaan yang diberikan atau yang menjadi tanggungjawabnya dapat dilakukan dan terselesaikan sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan berkaitan indikator kemampuan sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh seseorang karyawan agar tugas dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. diperoleh jawaban ya, setuju sebanyak 14 (empat belas) orang atau 100% responden. Demikian pula terhadap pertanyaan bahwa tidak semua tugas pekerjaan dapat berjalan mulus tanpa kendala tertentu namun pegawai tetap sedapat mungkin berupaya untuk menyelesaikannya, diperoleh jawaban ya, harus menyelesaikannya sebanyak 10 orang atau 85,71%, sementara 2 (dua) orang atau 14,29% responden menjawab belum sesuai.

5. Komunikasi (Communication)

Komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan kerjasama agar tujuan organisasi dapat tercapai. mencapai tujuannya dengan baik. Jawaban responden terhadap pertanyaan terkait indikator komunikasi ini, diperoleh jawaban yang menunjukkan setuju sebanyak 14 (empat belas) orang atau 100% responden. Demikian juga dengan pertanyaan bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pegawai atau lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, agar dapat meningkatkan kinerja organisasi, keseluruhan responden atau 100% memberikan jawaban setuju.

KESIMPULAN

Penempatan kerja pegawai harus benar-benar didasari pada indikator-indikator yang menjadi persyaratan, sehingga dapat mendukung kinerja demi pencapaian tujuan organisasi. Dan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan :

1. Penempatan

- a. Prosedur Penempatan, harus sesuai dengan sumberdaya manusia, sehingga untuk menempati bidang tertentu sebaiknya harus melalui proses yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang



berlaku, namun pada kenyataannya dalam proses penempatan sumberdaya manusia/pegawai masih belum memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku.

- b. Pengetahuan termasuk salah satu faktor yang penting atau urgen dan berpengaruh dalam penempatan pegawai terkait bidang tugas pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai, dengan mengacu pada syarat-syarat yang berlaku.
 - c. Keterampilan, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam penempatan pegawai namun dalam proses penempatan pegawai masih ditemui ada yang belum sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
 - d. Kemampuan, pada prinsipnya kemampuan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan, terutama kemampuan yang sesuai dengan bidang yang ditekuninya, namun kenyataan masih ditemui responden yang memilih untuk menjawab tidak tahu..
 - e. Sikap, merupakan bagian yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam menjalankan perintah atau aturan maupun tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Meskipun selalu diperhadapkan dengan tugas rutin yang dirasakan membosankan, namun tetap harus menunjukkan sikap yang toleran dengan dedikasi yang tinggi agar tujuan organisasi dapat tercapai, namun demikian terkait bidang pekerjaan yang ditekuni selain pegawai bertanggungjawab dan telah bekerja sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, masih ditemui responden yang memilih belum sesuai dan tidak tahu.
2. Kinerja
- a. Kualitas Kerja (quality of work), merupakan salah satu bagian yang menjelaskan tentang keberhasilan organisasi, namun masih terdapat responden yang tidak tahu bagaimana kualitas kerja yang menunjang keberhasilan organisasi.
 - b. Ketepatan Waktu (Promptness), dalam melakukan pekerjaan sangat penting, meskipun sebahagian besar responden menjawab ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sudah baik, namun masih ada responden yang tidak tahu apakah sudah sesuai dengan waktu dan kualitas kerja yang telah ditargetkan. Dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan kadang-kadang menemui kendala tertentu sehingga tidak dapat terselesaikan tepat waktu.
 - c. Inisiatif (Initiative) bahwa dalam keadaan yang mendesak dan penting dibutuhkan inisiatif tertentu sebagai solusi yang harus ditempuh, sebahagian besar memberikan setuju harus ada inisiatif bahkan turut menginisiasi untuk segera mencari solusi, namun demikian masih terdapat responden memberikan jawaban tidak setuju, dan tidak tahu.
 - d. Kemampuan (Capability) bahwa kemampuan adalah hal yang wajib dimiliki oleh seseorang karyawan agar tugas dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, namun demikian tidak semua tugas pekerjaan dapat berjalan mulus tanpa kendala tertentu namun pegawai sedapat mungkin berupaya untuk menyelesaikannya.
 - e. Komunikasi (Communication) adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan kerjasama yang baik agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan baik. Dan seluruh responden menyatakan setuju kalau komunikasi sangat penting dalam mendukung kerja sama demi pencapaian tujuan organisasi. Ini mengindikasikan bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pegawai atau lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, terlebih lagi terkait dengan kinerja organisasi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Agus. 2003. Manajemen Prestasi, Jakarta, Rajawali Press.
Handoko, T. Hani, 2008, Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.



Hasibuan, Melayu, SP., 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Bumi Aksara.

Mangkunegara, Anwar A. A., 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya.

Mathis Robert L., Jhon H. Jackson, 2007, Human Resource Management. Edisi Duabelas, Penerbit Cengage Learning

Siagian, Sondang P., 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, Metode Penelitian Survei, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Sunyoto, Danang, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama Yogyakarta : CAPS.

Wibowo. 2009. Manajemen Kinerja, Edisi Kedua, Jakarta, Rajawali Pers.

Peraturan KPU Nomor 03 tahun 2013 Tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum





ANALISIS PELUANG INVESTASI PDAM TIRTA KALWEDO KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

INVESTMENT OPPORTUNITIES ANALYSIS OF PDAM TIRTA KALWEDO, SOUTHWEST MALUKU DISTRICT

Mohammad Soleh ¹

¹Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

¹mohammad.soleh@kemenkeu.go.id

Abstrak

PDAM Tirta Kalwedo merupakan BUMD air minum yang berperan besar dalam memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), meskipun begitu jumlah penduduk MBD yang dapat dilayani baru sebesar 15,25%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja PDAM Tirta Kalwedo bila dilihat dari penilaian BPPSPAM dan bagaimana peluang investasi pada PDAM Tirta Kalwedo bila dilihat dari analisis SWOT dan analisis kelayakan investasi dari proyeksi keuangan 5 tahun kedepan. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama dari laporan keuangan PDAM, business plan 2022-2026 dan hasil wawancara dengan Direktur PDAM Tirta Kalwedo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian BPPSPAM kinerja PDAM Tirta Kalwedo dalam kategori sakit, hasil analisis SWOT menunjukkan posisi PDAM Tirta Kalwedo dalam kuadran I yang berarti dalam posisi tumbuh dan berkembang. Hasil penilaian kelayakan investasi menunjukkan nilai *Net Present Value* positif, *Internal Rate of Return* lebih dari 12% dan *Payback Period* lebih rendah dari jangka waktu investasi, sehingga investasi di PDAM Tirta Kalwedo layak untuk dilanjutkan.

Kata Kunci: PDAM, kinerja, Investasi, BPPSPAM, SWOT

Abstract

PDAM Tirta Kalwedo is a drinking water BUMD that plays a major role in meeting drinking water needs in southwest Maluku Regency (MBD), even so, the number of MBD residents that can be served is only 15.25%. The purpose of this study is to find out how the performance of PDAM Tirta Kalwedo is seen from the BPPSPAM assessment and what are the investment opportunities in PDAM Tirta Kalwedo when seen from the SWOT analysis and investment feasibility analysis of the financial projections for the next 5 years. The research method uses a qualitative approach, with the main data source being the PDAM's financial reports, the 2022–2026 business plan, and the results of interviews with the Director of PDAM, Tirta Kalwedo. The results showed that based on BPPSPAM's assessment of PDAM Tirta Kalwedo's performance in the sick category, the results of the SWOT analysis showed that PDAM Tirta Kalwedo's position was in quadrant I, which means in a position to grow and develop. The results of the investment feasibility assessment show that the net present value is positive, the internal rate of return is greater than 12%, and the payback period is shorter than the investment period, so that investment in PDAM Tirta Kalwedo is feasible to continue.

Keywords: PDAM, performance, Investment, BPPSPAM, SWOT



PENDAHULUAN

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla bersama Kurang lebih 193 kepala negara hadir pada pertemuan PBB pada tanggal 25 September 2015 untuk mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Agenda SDGs berisi 17 tujuan dan 16 target yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2030. Salah satu tujuan SDGs yakni tujuan ke-6 adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua (sdg2030indonesia.org, 2017).

Air bersih adalah kebutuhan utama semua orang di muka bumi. Dalam rangka Implementasi SDGs terutama penyediaan air bersih bagi masyarakat Indonesia, Pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah berusaha memaksimalkan perusahaan/ Badan Usaha Milik Daerah untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat. Saat ini jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum yang layak semakin meningkat tiap tahunnya, berdasarkan data BPS sekitar 91,05% jumlah rumah tangga di Indonesia dapat mengakses air minum yang layak, sedangkan di Provinsi Maluku sebesar 92,10%, namun jumlah persentase rumah tangga pedesaan di Maluku hanya sebesar 87,75% (BPS, 2022).

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di perkotaan dan pedesaan saat ini hampir disetiap kabupaten/ kota telah berdiri perusahaan daerah air minum. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendirikan perusahaan daerah air minum dengan nama PDAM Tirta Kalwedo melalui Peraturan Bupati Maluku Barat Daya nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya dan diperkuat dengan Perda Nomor 07 Tahun 2014 Tanggal 19 November 2014. Kabupaten MBD memiliki jumlah penduduk Tahun 2021 sebanyak 81.928 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan. Namun sungguh disayangkan hanya sebesar 15,25% atau sebanyak 12.534 jiwa melalui 2.089 Sambungan Rumah (SR) yang bisa menikmati air bersih. Fakta ini cukup bertentangan dengan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih di Maluku sebesar 93,21%.

Penelitian terhadap kinerja PDAM sebelumnya dilakukan oleh Kase at.al (2020). Dimana dengan analisis SWOT dapat diketahui strategi apa yang dapat diterapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Dharma kabupaten Belu. Penelitian sejenis dilakukan oleh Romadhani & Nurkholis (2014), dimana untuk mengukur kinerja PDAM Kabupaten Pasuruan dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja dari BPPSPAM dan Pengukuran berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 47 Tahun 1999, serta dengan cara membandingkan proyeksi kinerja keuangan dan kesehatan tahun depan dibandingkan tren kinerja kesehatan dan keuangan lima tahun terakhir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja PDAM Tirta Kalwedo bila dilihat dari penilaian BPPSPAM dan bagaimana peluang investasi pada PDAM Tirta Kalwedo bila dilihat dari analisis SWOT dan analisis kelayakan investasi dari proyeksi keuangan 5 tahun kedepan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan penting bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan PDAM Tirta Kalwedo Kabupaten MBD, sehingga perusahaan bisa berkembang dengan optimal dan dapat memenuhi kebutuhan utama masyarakat MBD yakni air bersih.

Kinerja pada dasarnya merupakan arti dari kata “performance” yakni prestasi kerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja karyawan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya (Mangkunegara, 2017:153). Kinerja adalah proses dimana kinerja individual diukur dan dievaluasi (Wibowo, 2017).

Pengukuran kinerja PDAM awalnya diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Setiap tahun dilakukan penilaian kinerja dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar penentuan kinerja PDAM. PDAM akan mendapat kategori “Baik Sekali” jika penilaian lebih dari 75; kategori “Baik” jika penilaian kinerja antara 60 sampai dengan 75; kategori “Cukup” jika penilaian kinerja antara 45 sampai dengan 60; kategori “Kurang” jika penilaian kinerja antara 30 sampai dengan 45; dan kategori “Tidak Baik” jika penilaian kinerja 30 kebawah.



Pada tahun 2015 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem penyediaan air minum. Berdasarkan PP tersebut maka dibentuklah Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016. BPPSPAM merupakan badan dibawah kementerian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum. BPPSPAM bertugas untuk melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh BUMN dan/atau BUMD untuk pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum.

Penilaian kinerja PDAM oleh BPPSPAM dilakukan berdasarkan 18 indikator penilaian yang terbagi dalam empat aspek yakni Aspek Keuangan (25%), Aspek Pelayanan (25%), Aspek Operasional (35%), dan Aspek Sumber daya manusia (15%). Hasil penilaian terhadap empat aspek tersebut menghasilkan tiga kategori penilaian kinerja PDAM sebagai berikut: Sehat, penilaian diatas 2,8, Kurang Sehat penilaian 2,2 sd 2,8 dan Sakit penilaian dibawah 2,2 (Direktorat Air Minum, 2021).

Tabel 1.
18 Indikator Penilaian Kinerja PDAM

Aspek Keuangan	Aspek Pelayanan	Aspek Operasional	Aspek SDM
ROE	Cakupan Pelayanan Teknis	Efisiensi Produksi	Rasio pegawai
Rasio Operasi	Pertumbuhan pelanggan	Tingkat kehilangan air (NRW)	Rasio diklat pegawai
Rasio Kas	Tingkat penyelesaian pengaduan	Jam operasi layanan	Rasio beban diklat pegawai
Efektivitas Penagihan	Uji kualitas air	Tekanan air pelanggan	
Solvabilitas	Konsumsi air domestik	Penggantian meter air	

sumber: Direktorat Air Minum, 2021

Presiden RI pada Tanggal 20 Juli 2020 mengeluarkan Perpres Nomor 82 tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Covid-19. Perpres ini menyebabkan pembubaran 18 Badan/ Tim kerja dan Komite, termasuk dua lembaga terkait penyediaan air minum yakni BPPSPAM dan Tim Koordinasi pemantauan dan Evaluasi atas pemberian jaminan dan Subsidi bunga kepada PDAM dalam rangka percepatan Penyediaan Air Minum. Selanjutnya BPPSPAM berada dibawah Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR (Bisnis.com, 2020).

Analisis SWOT menurut Rangkuti (2018) adalah metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu investasi. Hal tersebut berdasarkan asumsi suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancamannya. Alat yang dapat dipakai perusahaan untuk menyusun strategi-strategi adalah matrik SWOT.

Tabel 2. Matrik SWOT

EFA\ EFI	Strength (S) (Tentukan 4-10 faktor kekuatan internal)	Weakness (W) (Tentukan 4-10 faktor kelemahan internal)
Opportunities (O) (Tentukan 4-10 faktor Peluang eksternal)	Strategi SO Daftar kekuatan untuk untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada	Strategi WO Daftar untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada
Threats (T) (Tentukan 4-10 faktor ancaman eksternal)	Strategi ST Daftar kekuatan untuk untuk menghindari ancaman	Strategi WT Daftar untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti, 2018

Untuk menghitung kelayakan investasi, metode yang digunakan adalah perhitungan *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Payback Period* (PP).

NPV dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Keuntungan bersih tersebut dihitung dari selisih nilai sekarang investasi dengan aliran kas bersih yang diharapkan dari proyek atau investasi di masa yang akan datang atau pada periode tertentu. Metode Net Present Value (NPV) merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih (proceeds) dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi (Giatman, 2017).



Bila $NPV_0 > NPV_1$, maka investasi atau proyek dinilai tidak layak, berisiko mengalami kerugian. Bila $NPV_0 < NPV_1$, investasi atau proyek dinilai layak, berpotensi menghasilkan keuntungan. Bila $NPV_0 = NPV_1$, investasi atau proyek dinilai tidak layak, tidak menghasilkan keuntungan. Perhitungan NPV dirumuskan sebagai berikut:

$$NPV = \sum PV_t - \hat{NPV} = \sum PV_t - A_0$$

$$NPV = (PV_1 + NPV = (PV_1 + PV_2 + \dots) - A_0$$

$$PV = NCF \times f \quad PV = NCF \times \text{faktor diskon}$$

$$\text{Faktor diskon} \quad \text{Faktor diskon} = 1/(1+r)^t$$

Keterangan:

NPV	=	Nilai Bersih saat ini (Net Present Value)
PV	=	Nilai saat ini (Present Value)
NCF	=	Aliran Kas
A ₀	=	Investasi yang dikeluarkan pada awal tahun
r	=	Biaya Modal
t	=	Periode waktu investasi/proyek

Internal Rate of Return adalah tingkat suku bunga (*discount rate*) yang membuat nilai NPV proyek sama dengan nol. Informasi yang dihasilkan pada metode IRR ini, berkaitan dengan tingkat kemampuan *cashflow* dalam mengembalikan modal investasi yang dijelaskan dalam bentuk persen (%) periode waktu dan seberapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi (Giatman, 2017). Nilai IRR diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$IRR = i = \frac{NPV}{NPV - NPV'} (i' - i)$$

Keterangan:

i	=	Suku bunga yang menghasilkan NPV Positif
i'	=	Suku bunga yang menghasilkan NPV Negatif
NPV	=	NPV bernilai positif
NPV'	=	NPV bernilai negatif

Penilaian kelayakan berdasarkan IRR adalah: Jika $IRR > \text{discount rate}$, secara finansial proyek layak untuk dilaksanakan. Jika $IRR < \text{discount rate}$, secara finansial proyek tidak layak untuk dilaksanakan.

Payback Period adalah merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk (*proceeds*) tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut (Giatman, 2017). Metode ini mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Jika periode pengembalian ini lebih pendek (cepat) dari umur proyek yang diisyaratkan, maka proyek dianggap menguntungkan; sedang jika periode pengembalian lebih panjang (lama) dari umur proyek yang diisyaratkan, maka proyek dianggap tidak menguntungkan. Metode ini dapat mengukur seberapa cepat suatu investasi bisa kembali. Dasar yang digunakan dalam metode ini adalah aliran kas, bukan laba. Untuk itu perlu dihitung aliran kas setiap proyek. Metode *Payback Period* juga mencerminkan terjadinya arus permintaan/ arus kas masuk (*cash inflow*) secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. *Payback Period* merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh modal yang telah diinvestasikan yang dinyatakan dalam satuan tahun.



Penilaian kelayakan investasi dengan menggunakan metode *Payback Period* didasarkan pada lamanya investasi tersebut dapat tertutup dengan aliran-aliran kas masuk. Jika arus kas dari rencana investasi berbeda nilainya setiap tahun menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PP = t + \frac{I_0 - c}{d - c}$$

Keterangan:

t = Tahun terakhir arus kas masih belum bisa menutupi investasi awal

I_0 = Jumlah investasi awal

c = Jumlah kumulatif arus kas pada periode t

d = Jumlah kumulatif arus kas sebelum periode t

Penilaian kelayakan berdasarkan PP adalah: Jika $PP >$ umur proyek, berarti secara finansial proyek layak dilaksanakan. Jika $PP <$ umur proyek, berarti secara finansial proyek tidak layak dilaksanakan

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yakni berusaha menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa data, membandingkan dan menarik kesimpulan. Ruang lingkup atau objek yang diteliti adalah PDAM Tirta Kalwedo Kabupaten MBD yang terdiri dari tiga unit PDAM yakni PDAM Kota Tiakur, PDAM Kota Tapa dan PDAM Kota Wonoreli. Data penelitian berasal dari Laporan keuangan PDAM Tirta Kalwedo periode 2019-2021, *Business plan* PDAM untuk tahun 2022 sd 2026, dan hasil wawancara dengan Direktur Utama PDAM Tirta Kalwedo. Semua data yang terkumpul dilakukan interpretasi, analisis dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setiap tahun BPPSPAM, Ditjen Bina Karya Kementerian PUPR bekerjasama dengan BPKP melakukan penilaian terhadap kinerja PDAM se Indonesia. Pada Tahun 2021 terdapat 388 BUMD air minum yang dilakukan penilaian. Dibawah ini adalah table penilaian kinerja PDAM Tirta Kalwedo selama tiga tahun terakhir yakni Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021

Tabel 3
Penilaian Kinerja PDAM Tirta Kalwedo dari BPPSPAM

Tahun	Jumlah Pelanggan	Nilai	Kondisi
2019	602	1,84	Sakit
2020	1.435	2,16	Sakit
2021	1.824	2,15	Sakit

Sumber: BPPSPAM & Direktorat Air Minum, diolah

Berdasarkan data pada *business plan* PDAM Tirta Kalwedo 2022-2026 dan hasil wawancara dengan Direktur Utama PDAM Tirta Kalwedo, dapat dijelaskan beberapa sumber permasalahan utama yang berpengaruh besar terhadap hasil penilaian kinerja PDAM Tirta kalwedo antara lain:

1. Aspek keuangan masih mendapat penilaian yang rendah karena perusahaan masih mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir
2. Rasio operasi belum cukup baik 1,04 (Rasio masih diatas standar normalnya yakni 0,85)
Penyebab permasalahan ini antara lain: Beban operasi sumber air masih belum efisien, besarnya beban administrasi dan umum, tingginya beban energi (BBM), Tingkat konsumsi masih rendah akibat kurang



- optimalnya pendistribusian air, serta jumlah sambungan belum optimal terhadap kapasitas SPAM terpasang
3. Konsumsi Air Domestik rendah 7,12M3/SR/bln (Nilai masih dibawah batas standar yakni 15 M3/SR/bl)

Hal ini disebabkan oleh penggunaan tenaga matahari sebagai sumber energi utama di unit Kaiwatu, sehingga tidak bisa beroperasi 24 jam. Genset sudah terpasang tapi jam operasi dibatasi hanya 10 jam karena mahal biaya BBM. Volume air yang didistribusikan ke pelanggan masih kurang, untuk mengatasinya dilakukan secara bergantian.
 4. Efisiensi produksi masih rendah 22,99% (< 60%)

Hal ini disebabkan oleh Jumlah air yang diproduksi masih rendah (penggunaan tenaga matahari) sehingga hanya optimal di siang hari, Tidak optimalnya sistem produksi, dan Jam operasi yang terbatas. Kebocoran air yang terjadi juga masih cukup besar, yakni sebesar 19,19% hampir mendekati nilai maksimal yaitu 20%.
 5. Tekanan sambungan pelanggan 62,49%

Penyebab dari hal ini adalah terbatasnya alat ukur tekanan air.
 6. Penggantian Meter Air rendah hanya sebesar 0.84 % (< 5%)

Penggantian meter air masih belum bisa dilakukan secara optimal karena kekurangan dana baik penggantian maupun pembelian.
 7. Ratio jumlah pegawai terhadap jumlah pelanggan tinggi 29,81 orang (> 14 orang)

Hal ini disebabkan Jumlah pegawai yang terlalu banyak bila dibandingkan dengan jumlah pelanggan PDAM. Untuk mencegah penambahan jumlah pegawai baru telah dilakukan moratorium pengangkatan pegawai baru dan akan dilakukan penambahan jumlah pelanggan baru.
 8. Ratio Diklat Pegawai Terhadap Peningkatan Kompetensi 0,00%

Faktor pandemi covid-19 dan ketersediaan dana untuk diklat pegawai yang sangat kecil menjadi alasan sangat rendahnya atau bahkan tidak ada kegiatan diklat pegawai.

Hasil Analisis SWOT

Tabel 4.
Analisis Internal

Uraian	Keterangan	Kekuatan/ Kelemahan (K/L)	Nilai* (- 4 s/d 4)	Bobot (%)	Nilai Total
1) ASPEK TEKNIS: SISTEM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI					
- Ketersediaan Air Baku	Sumber air baku cukup banyak	K	4	5	0,20
- Kapasitas Idle	Kapasitas Produksi/Kapasitas Terpasang = 29,45%	K	3	5	0,15
- Sistem Produksi	70,54% realisasi produksi dari total volume terpasang	K	3	2	0,06
- Sistem Transmisi	Sistem transmisi tidak bermasalah	K	4	6	0,24
- Sistem Distribusi	Masih kurang lengkap	L	2	7	(0,14)
- Kehilangan Air	Sekitar 19,19%	K	3	8	0,24
- Kep. Pelanggan: Kualitas Air	Hasil Survei: 90% puas	K	3	3	0,09
- Kep. Pelanggan: Kuantitas	Hasil Survei: 85% puas	K	3	3	0,09
- Kep. Pelanggan: Kontinuitas	Hasil Survei: 75% puas	K	3	3	0,09
- Peralatan Penunjang Pemeliharaan	Peralatan Penunjang Pemeliharaan lengkap	K	3	3	0,09
Sub Jumlah					1,25



2	ASPEK KEUANGAN					
-	Hasil Audit Bpkp/Kap	Tahun 2021 opini WTP	K	4	7	0,28
-	Efisiensi Penagihan	Efisiensi penagihan 76,47%	K	2	5	0,10
-	Piutang Tagihan	58 hari	K	1	5	0,05
-	<i>Current Ratio</i>	4x	K	4	7	0,28
-	Total Hutang Jangka Panjang / Total Asset	1031%	K	4	6	0,24
-	Tarif Rata-Rata Vs Biaya Rata-Rata	Tarif Rata-Rata Vs. Biaya Rata-Rata = 23,58%	L	(2)	10	(0,20)
-	Tertib Pelaporan	Laporan bulanan dibuat setiap bulan dan tepat waktu	K	4	2	0,08
Sub Jumlah						0,83
3	ASPEK ORGANISASI DAN SDM					
-	Rasio pegawai/ Jumlah Sambilan	Rasio pegawai /Jumlah Sambilan = 28,72	L	(2)	2	(0,04)
-	Tingkat Pendidikan / Keahlian	Terdapat sekitar 65% karyawan berpendidikan diatas SMA/SMK dibanding total karyawan	L	(1)	2	(0,02)
-	Hubungan Antar Unit Kegiatan (Sop/ Sotk)	Baik	K	3	1	0,03
-	Jenjang Karir, Program Penghargaan, Dan Penghasilan	Sudah ada penjenjangan karir. Belum ada program penghargaan Karyawan merasa penghasilan belum cukup.	K	1	2	0,02
-	Struktur Organisasi Dan Keseimbangan Tenaga Teknis Dan Non Teknis	Terdapat sekitar 46% tenaga bidang tehnik dibanding total karyawan	K	2	1	0,02
Sub Jumlah						0,01
4	ASPEK HUBUNGAN LANGGANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT					
-	Fleksibilitas dalam pembayaran tagihan	Pelanggan belum dapat membayar di bank/ATM namun hanya melalui Loker Ktr PDAM.	L	1	1	(0,01)
-	Pelayanan pengaduan	pengaduan yang direspon berkisar 95%	K	3	2	0,06
-	Pelayanan Sambilan Baru	Rata-rata 2 hari untuk pelayanan Sambilan baru	K	2	1	0,02
-	Forum Komunikasi Pelanggan	Belum ada Forum Komunikasi Pelanggan	L	(1)	1	(0,01)
Sub Jumlah						0,07
JUMLAH ANALISA SWOT FAKTOR INTERNAL :			2,31			

Tabel 5.
Analisis Eksternal

Uraian	Keterangan	Peluang / Ancaman (P / A)	Nilai (- 4 s/d 4)	Bobot (%)	Nilai Total	
1) ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT						
-	Kondisi Ekonomi Masyarakat	Pendapatan Tiap Rumah Tangga / bulan (SKP 2021): Rp. 3 Juta	P	2	10	0,20
-	Pola Pemakaian Air	Rata-rata cukup: 15 m3/rumah/bulan (Tahun 2021)	P	2	7	0,14
-	Minat sebagai Pelanggan baru	Hasil survei peminat sekitar 75%	P	3	15	0,45

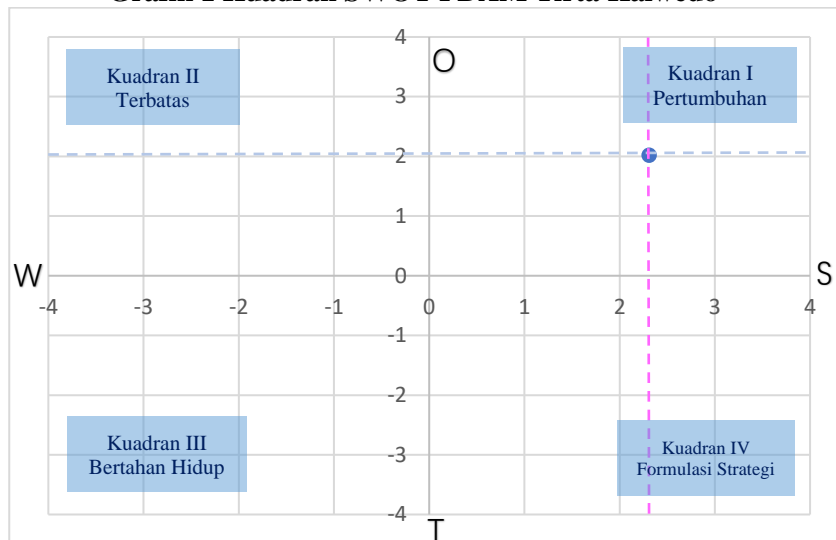


Sub Jumlah					0,79
2) ASPEK EKONOMI NASIONAL / DAERAH					
- Peningkatan Harga Bbm, Listrik, Dll	Biaya BBM meningkat 12% per tahun	A	(1)	10	(0,10)
- Kenaikan Upah Minimum Regional	Kenaikan UMR sebesar 13%	A	(1)	5	(0,05)
Sub Jumlah					(0,15)
3) ASPEK DUKUNGAN DARI PEMERINTAH DAERAH & DPRD					
- Dukungan Pemda untuk kenaikan Tarif	Pemda sangat setuju	P	4	10	0,40
- Dukungan Dprd untuk kenaikan Tarif	DPRD sangat setuju	P	4	10	0,40
- Dukungan pendanaan	Dalam setahun terakhir belum ada penyertaan dana	A	(2)	5	(0,10)
Sub Jumlah					0,70
4) ASPEK HUKUM					
- Peraturan Daerah	Perda lama masih sesuai, namun akan dibuat perda baru yang lebih update.	P	4	5	0,20
- Otonomi Daerah	Sulit menggunakan sumber air dari wilayah lain	A	(2)	3	(0,06)
- Uu Pelindungan Konsumen	Secara umum UU kurang mendukung, , pelanggan masih merasa pelayanan memuaskan	P	2	5	0,10
Sub Jumlah					0,24
5) ASPEK GEOGRAFIS, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN					
- Topografi Dan Lokasi Daerah Urban/Pemukiman	Pengaliran distribusi kebanyakan dapat dilakukan secara gravitasi	P	2	5	0,10
- Adanya Ancaman Terhadap Kelestarian Sumber Air	Sumber air masih bagus	P	3	3	0,09
- Iklim Dan Curah Hujan	Curah hujan cukup dan tidak mempengaruhi sumber air PDAM	P	2	4	0,08
- Penyedotan Air Tanah Dalam	masyarakat banyak yang memakai air tanah dalam dan ada sumber air pilihan lainnya	A	(1)	3	(0,03)
Sub Jumlah					0,24
JUMLAH ANALISA SWOT FAKTOR EKSTERNAL:			2,02		

Sumber: PDAM Tirta Kalwedo Kab. MBD

Dari tabel hasil analisa diatas, jika digambarkan dalam diagram SWOT, posisi PDAM Tirta Kalwedo berada pada kuadran I – *Aggressive Maintenance*, dengan gambaran sebagai berikut:

Grafik 1 Kuadran SWOT PDAM Tirta Kalwedo



Sumber: PDAM Tirta Kalwedo Kab. MBD

Dari grafik di atas bisa disimpulkan, meskipun perusahaan menghadapi banyak ancaman, perusahaan masih mempunyai keunggulan sumber daya. Posisi kuadran I merupakan posisi yang cukup strategis dan dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan penambahan pelanggan baru. Strategi tepat untuk pengembangan perusahaan yang berada pada kuadran ini adalah diversifikasi produk atau pasar. Dalam posisi ini relatif memiliki lebih banyak kekuatan dari pada kelemahan, dan mempunyai cukup peluang untuk tumbuh.

Analisis Kelayakan Investasi dari finansial Perusahaan

Analisis ini dilakukan dengan cara melakukan analisis NPV, nilai IRR dan berapa lama *Payback period*. Berdasarkan data di *business plan* PDAM Tirta Kalwedo, dalam 5 tahun kedepan direncanakan akan ada investasi yang masuk sebesar 13 Miliar ke PDAM Tirta Kalwedo baik yang berasal dari Pemerintah daerah maupun pusat serta dari pihak lainnya.

**Tabel 7.
Data dan Perhitungan NPV, IRR dan PP**

	2022	2023	2024	2025	2026
t	0	1	2	3	4
Cash In		7.775.700.750	8.179.852.475	6.835.976.550	6.335.102.275
Cash Out	(13.000.000.000)	3.103.271.880	3.353.631.818	2.814.744.818	2.798.456.818
Net Cash Flow	(13.000.000.000)	4.672.428.870	4.826.220.657	4.021.231.732	3.536.645.457
Biaya Modal (r)	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
Faktor Diskon	1,000	0,893	0,797	0,712	0,636
A0	(13.000.000.000)				
PV		4.171.811.491	3.847.433.559	2.862.233.319	2.247.602.125
NPV					129.080.494
IRR					12,50%
Payback Period					3,87

Sumber: data diolah

Pembahasan

Penilaian dari BPPSPAM

Penilaian BPPSPAM terhadap kinerja PDAM Tirta Kalwedo sampai dengan saat ini masih menunjukkan kategori sakit. BPPSPAM menggunakan 18 Indikator penilaian yang dibagi menjadi 4 aspek yakni aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sdm. Pada bagian Aspek Keuangan, PDAM Tirta Kalwedo mendapatkan nilai negatif pada ROE, karena perusahaan mengalami kerugian



berdasarkan laporan laba rugi tahun 2019-2021. Rasio solvabilitas masih cukup baik karena nilai kewajiban perusahaan cukup kecil bila dibandingkan aset dan ekuitasnya.

Aspek pelayanan mendapat penilaian negatif dari segi Cakupan Pelayanan Teknis, pertumbuhan pelanggan, dan konsumsi air domestik. Peningkatan cakupan layanan dan pertumbuhan pelanggan masih terkendala kemampuan keuangan perusahaan. Namun PDAM Tirta Kalwedo telah berkomitmen untuk melakukan penambahan pelanggan baru yang lebih besar mengingat presentase jumlah pelanggan masih sangat kecil dibanding jumlah penduduk di MBD. Konsumsi air yang rendah berkaitan dengan aspek operasional dimana faktor distribusi air yang kurang baik dan jam layanan yang terbatas.

Aspek operasional memiliki penilaian terbanyak dari BPPSPAM, namun disini justru banyak penilaian negatif yang didapat PDAM Tirta Kalwedo. Efisiensi Produksi, Tingkat kehilangan air (NRW), Jam operasi layanan, Tekanan air pelanggan dan penggantian meter air masih terdapat permasalahan. Tingkat kehilangan air mencapai 19 % hampir mendekati batas maksimal yakni 20%. Jam operasi juga masih terbatas karena belum beroperasinya saluran PLN, sehingga saat ini PDAM tidak bisa beroperasi 24 jam. PDAM telah mendapatkan dukungan dari Pemkab MBD untuk mendapat saluran daya dari PLN pada Tahun 2023. Pihak manajemen berkomitmen untuk menekan tingkat kebocoran air dengan meningkatkan kemampuan Sdm pengelola dan penggantian pipa yang rusak sehingga semakin berkurang persentase kebocorannya.

Aspek sumber daya manusia juga masih mendapat penilaian yang negatif. Rasio jumlah pegawai melebihi batas standar bila dibandingkan jumlah pelanggan PDAM, selain itu rendahnya tingkat pelatihan yang didapat pegawai juga berpengaruh terhadap penilaian kinerja perusahaan. Untuk mengatasi kelebihan jumlah pegawai, pihak manajemen telah mengadakan moratorium penerimaan pegawai baru, selain itu penambahan jumlah pelanggan baru juga terus dilakukan. Untuk pelatihan kepada pegawai saat ini terkendala biaya, namun akan diupayakan dengan cara pelatihan secara online dan kerjasama dengan kementerian PUPR atau Pemprov Maluku untuk penyelenggaraan pelatihan.

Analisis SWOT

Berdasarkan analisis SWOT, Perusahaan posisinya berada dalam kuadran I. masih ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dibawah ini bisa digambarkan matrik SWOT dan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 6:
Matriks SWOT dan Strategi Umum PDAM Tirta Kalwedo

<h1>SWOT</h1>	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber air baku sangat banyak. 2 Kapasitas Produksi/ terpasang adalah 29,45% 3 Dari Total Volume produksi terpasang terealisasi 70,54 % 4 Sistem Transmisi tidak bermasalah 5 Kehilangan air 19,19% di tahun 2021 6 Opini hasil audit KAP adalah WTP, hasil audit tahun 2021 (resume AKP) 7 Efisiensi penagihan sebesar 76,47 % (2021, audit Kinerja) 8 Laporan Bulanan di buat tepat waktu 9 Jumlah ekuitas perusahaan sangat besar dibandingkan dana yang berasal dari utang pinjaman. 10 Hasil survey kepada pelanggan 80% pelanggan puas terhadap kualitas air PDAM, 70 % 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tarif rata-rata vs biaya rata-rata = 23,58% 2 Rasio Karyawan terhadap jumlah pelanggan masih cukup rendah. 3 Terdapat sekitar 65% karyawan berpendidikan SMA/SMK di banding total karyawan 4 Forum Komunikasi Pelanggan belum terbentuk.

		terhadap kuantitas air PDAM dan 75 % pelanggan puas terhadap kontinuitas layanan air PDAM. II PDAM merespon 95% dari total pengaduan	
PELUANG		STRATEGI (K-P)	STRATEGI (L-P)
1	Pendapatan tiap rumah tangga/bulan adalah Rp. 3 juta.	1 Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air bersih dengan menambah jaringan dan sambungan langganan.	1 Mengusahakan sharing modal investasi dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
2	Rata-rata konsumsi air PDAM per rumah tangga per bulan 15 m ³ .	2 Memanfaatkan idle capacity yang masih tersedia	2 Meningkatkan dan mengembangkan cakupan layanan
3	Minat menjadi pelanggan PDAM cukup tinggi, sesuai hasil survei mencapai 75%.	3 Mengoptimalkan kapasitas produksi yang ada	3 Meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya operasi
4	Dukungan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan tarif air cukup kuat.	4 Mengoptimalkan blok-blok pelayanan.	4 Memelihara sistem produksi dan distribusi.
5	Dukungan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menyesuaikan tarif PDAM cukup kuat.	5 Melakukan kerja sama dengan pihak berkompeten.	5 Melakukan penggantian meter secara berkala
6	Pengaliran air distribusi dilakukan secara grafitasi	6 Menerapkan sistem reward and punishment	6 Meningkatkan komunikasi yang lebih intens dengan stakeholders
7	Sumber air masih bagus	7 Mepedomani rencana strategis perusahaan.	7 Meningkatkan kinerja karyawan dengan melaksanakan program pengembangan SDM secara merata dan menerapkan sistem reward and punishment.
ANCAMAN		STRATEGI (K-A)	STRATEGI (L-A)
1	Terjadi kenaikan UMR sebesar 13%	1 Melakukan sosialisasi tentang pentingnya air bersih dalam kehidupan manusia	1 Melakukan efisiensi biaya BBM dan Administrasi umum
2	Penyertaan Modal tidak diperoleh dalam tahun 2022	2 Menyebarkan informasi/iklan tentang pelayanan air bersih PDAM	2 Memperoleh tambahan modal dari Pemda Maluku Barat Daya untuk mendukung perbaikan sistem.
3	Sulit memanfaatkan sumber air yang berasal dari wilayah lain.		
4	Terdapat cukup banyak sumur dalam milik masyarakat.		

Sumber: PDAM Tirta Kalwedo Kab. MBD

Analisis Kelayakan Investasi

Berdasarkan data diatas, hasil analisis kelayakan adalah:

- NPV bernilai positif yakni Rp129.080.494, menandakan secara finansial proyek itu layak dijalankan.
- IRR bernilai 12,50% lebih besar dari *discount rate* yang menandakan secara finansial proyek/ investasi tersebut layak untuk dijalankan dengan suku bunga sebesar 12%.
- PP bernilai 3,87 lebih kecil dari jangka waktu (t) dari proyek yang menandakan secara finansial proyek layak dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun (hingga tahun 2026).

Ketiga hasil tersebut menunjukkan bahwa investasi di PDAM Tirta Kalwedo layak untuk dilanjutkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Penilaian kinerja PDAM Tirta Kalwedo Kabupaten MBD dari BPPSPAM Tahun 2019 sampai dengan 2021 masih dalam kondisi “sakit”. Dimana banyak indikator yang bernilai negatif yang perlu dilakukan perbaikan baik dari aspek operasional, pelayanan, SDM maupun aspek keuangan.
2. Hasil dari Analisis SWOT PDAM Tirta Kalwedo menunjukkan bahwa PDAM Tirta Kalwedo berada pada kuadran I. Perusahaan pada posisi ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan penambahan pelanggan baru. Strategi untuk pengembangan perusahaan pada kuadran ini adalah diversifikasi produk atau pasar.
3. Hasil dari analisis kelayakan investasi berdasarkan proyeksi keuangan Tahun 2022-2006 antara lain: NPV bernilai positif yakni Rp129.080.494, IRR bernilai 12,50% lebih besar dari *discount rate* 12%, dan PP bernilai 3,87 lebih kecil dari jangka waktu (t) proyek. Ketiga hasil tersebut menunjukkan bahwa investasi di PDAM Tirta Kalwedo layak untuk dilakukan.
walaupun penilaian kinerja dari BPPSPAM masih sakit, PDAM Tirta Kalwedo berdasarkan analisis SWOT berada pada posisi yang bagus untuk tumbuh dan maju. Begitu juga bila dilakukan perhitungan kelayakan investasi menunjukkan kalau PDAM Tirta Kalwedo sangat layak untuk mendapatkan investasi dari investor.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan Perbaikan kinerja yang maksimal, diharapkan dari pihak manajemen perusahaan agar bisa melakukan efisiensi beban operasional seperti: beban pegawai, beban perkantoran, beban administrasi umum, beban penyusutan dan beban-beban lainnya sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba. Selain itu dari aspek operasional pengadaan aliran listrik PLN untuk PDAM mutlak dilaksanakan agar produksi bisa maksimal dan waktu beroperasi bisa berlangsung 24 Jam.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, kerjasama investasi harus dilakukan. Kerjasama investasi bisa dilakukan dengan berbagai pihak seperti: Pemda, Pemerintah pusat, PT SMI dan pihak swasta. Melalui sinergi bersama Pemda, Anggota DPRD, Pemerintah pusat dan dukungan masyarakat serta komitmen yang tinggi dari manajemen PDAM Tirta Kalwedo maka hal tersebut akan menjadi kekuatan yang besar bagi perusahaan bisa bangkit menjadi lebih baik, sehingga tujuan Sdgs Pemerintah dalam pemenuhan air bersih masyarakat di Kabupaten MBD akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis (2020). *BPPSPAM dibubarkan tugasnya pindah kesini*. Diakses 5 Desember 2022. Tersedia dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200721/45/1269227/bppspam-dibubarkan-tugasnya-berpindah-ke-sini>.
- BPPSPAM (2021). *Buku Kinerja BUMD Tahun 2020*. Diakses 6 Desember 2022. Tersedia dari: https://airminum.ciptakarya.pu.go.id/api/uploads/dokumentasi/kategori_2/kategori_2_20211201121014.pdf
- BPPSPAM (2022). *Buku Kinerja BUMD Tahun 2021*. Diakses 6 Desember 2022. Tersedia dari: https://airminum.ciptakarya.pu.go.id/api/uploads/dokumentasi/kategori_4/kategori_4_20220325093143.pdf.
- BPS (2022). *Persentase rumah tangga menurut provinsi tipe daerah dan sumber air minum*. Diakses 5 Desember 2022. Tersedia dari: <https://www.bps.go.id/indicator/29/854/1/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-tipe-daerah-dan-sumber-air-minum-layak.html>.
- Giatman, M. (2017). *Ekonomi Teknik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kase, M. S, dkk. (2020). Analisis Strategi Pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma di Kabupaten Belu. *Eko Pem, Jurnal ekonomi Pembangunan Vol 5 No 1*.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- PDAM Tirta Kalwedo (2022). *Business plan 2022-2026*. Tiakur: PDAM Tirta Kalwedo.
- Rangkuti, F. (2018). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Romadhani & Nurkholis (2014), Analisis Kinerja Dan Kelayakan Investasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1*.



Sdg2030 Indonesia, (2020). *Apa itu SDGs*. Diakses 10 Desember 2022. Tersedia dari:
<https://www.sdg2030indonesia.org/>
Wibowo (2017). *Manajemen Kinerja Edisi 5*. Depok: Rajagrafindo Persada.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Copyright (c) 2023 Mohammad Soleh



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

POLICY IMPLEMENTATION OF SELF-SUPPORTING HOUSING STIMULAN ASSISTANCE PROGRAM

Zulfachry¹, Zul Fadli², Zul Rachmat³, ZH Nurul Kusumawardhani⁴, Nurhidayah⁵

¹Universitas Puangrimanggalatung

¹zulfachri25@gmail.com

²Universitas Pattimura

²dhidottt@gmail.com

^{3,4,5}STMIK Amika Soppeng

³zulrachmat@amiklps.ac.id

⁴zh.nurulkusumawardhany@yahoo.com

⁵nurhidayahjafarzm@gmail.com

Abstrak (11pt, bold)

Riset ini bertujuan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan mengidentifikasi faktor penentu dari implementasi kebijakan tersebut pada Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Riset ini menggunakan metode pendekatan yang fokus pada pengamatan yang lebih mendalam (kualitatif) dengan berdasar pada yang diberikan oleh responden secara lisan (wawancara), pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian (observasi), serta mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan riset ini (telaah dokumen). Hasil riset menunjukkan bahwa secara lugas pemerintah berpihak kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang yang telah ditetapkan, hanya saja ada beberapa masalah yang terletak pada pelaksanaan kebijakannya. Kemudian, dalam pemenuhan aspek kebijakan, bantuan sumberdaya dan instansi yang berhubungan langsung telah membuktikan bahwa pemerintah berpihak pada masyarakat akan kebutuhan hunian yang layak, sehingga situasi tersebut berjalan sebagaimana mana mestinya. Program BSPS ini dapat terlaksana dengan cepat dan tepat karena adanya dukungan dari segi kondisi ekonomi masyarakat, keterikatan dan kecakapan dalam bergotong-royong

Kata Kunci : implementasi kebijakan, program BSPS

Abstract

This research aims to explain the implementation of government policies in the self-help housing stimulant assistance program (BSPS) and identify the determinants of the implementation of these policies in the Lalabata Rilau Village, Lalabata District, and Soppeng Regency. This research uses an approach that focuses on more in-depth observations (qualitative) based on what is provided orally by respondents (interviews), direct observation of the research location (observation), as well as studying the literature related to this research (review; document). The results of the research show that the government is straightforwardly on the side of the community in accordance with the mandate of the law that has been stipulated; it's just that there are a number of problems that lie in the implementation



of its policies. Then, in fulfilling the policy aspect, the assistance of resources and agencies that are directly related has proven that the government is on the side of the community regarding the need for adequate housing, so that the situation runs as it should. This BSPS program can be carried out quickly and precisely because of the economic conditions of the community, commitment, and skills in working together.

Keywords : *implementation of policies, self-help housing stimulant assistance programs.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah bertanggungjawab dalam memfasilitasi masyarakat agar kebutuhan hunian yang layak dapat terpenuhi dalam rangka memanifestasikan pemukiman yang memadai untuk semua orang. Sehingga pemerintah seharusnya membuat program-program pembangunan pemukiman yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Ada banyak program yang dibuat oleh pemerintah mengenai pemukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya, dimana ini adalah program dalam rangka peningkatan jumlah MBR dalam membangun pemukiman yang berkualitas.

Upaya pelaksanaan Program BSPS telah jelas aturannya, namun demikian komitmen aparat melayani dan partisipasi masyarakat masih terlihat lemah. Hal ini terlihat dan disebabkan karena lingkungan kebijakan ini di implementasikan dengan kondisi social yang berbeda, dukungan public dan actor pelaksana kebijakan bersinergi sehingga kebijakan ini dapat dilaksanakan. Satu hal yang dapat penulis melihat adanya factor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan bahwa kelayakan didasarkan pada data penerima bantuan dan memerlukan kerjasama stakeholders serta swadaya masyarakat dalam bentuk partisipasi, ini memerlukan perhatian dan didukung serta hamata yang dapat dicari solusinya sehingga kebijakan ini dapat terselenggara dengan baik.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada riset ini adalah bagaimana implementasi serta faktor determinan kebijakan dalam pelaksanaan program BSPS pada di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat riset ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui implementasi dan faktor determinan pada kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program BSPS di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

METODE

Lokasi Penelitian

Riset ini berlokasi di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Metode Penelitian

Riset ini memakai metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana riset ini menggambarkan tentang onjek riset secara deskriptif.

Sumber Data/Informan

Adapun sumber data pada riset ini adalah beberapa informan yang diantaranya adalah 1 orang Kepala Dinas PUPR Kabupate Soppeng, 1 orang pendamping lapangan, 2 orang tokoh masyarakat dan 3 orang pegawai Kantor Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sehingga total informan adalah 7 orang.



Fokus Penelitian

Pada riset ini, peneliti memfokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja aparat dalam mengimplementasikan kebijakan menurut teori Mazmanian & Sebatier dimana menurut ahli tersebut terdapat tiga kategori atas variabel yang mempengaruhi percepatan tercapainya tujuan formal dan semua proses implementasi kebijakan, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan karakteristik lingkungan.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam riset ini, dimana peneliti melakukan wawancara terhadap informan untuk menggali lebih dalam informasi yang berhubungan dengan riset ini. Kemudian sebelumnya peneliti juga melakukan observasi terlebih dahulu, serta tentunya aspek pendukung dari telaah dokumen yang berkaitan dengan riset ini.

Teknik Keabsahan Data

Dalam menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan metode pengamatan, triangulasi, *focus discussion group (FGD)*, uji transferabilitas, uji realibilitas, dan uji konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan peneliti serta pernyataan wawancara yang tidak berstruktur terhadap pegawai dan masyarakat di wilayah Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebagai informan pendukung penulis, bahwa sebahagian besar menyatakan program BPS sebagai sebuah kebijakan yang mampu memahami karakteristik masalah atas kelompok sasaran menunjukkan bahwa hal ini bermula pada teknis permasalahan yang dihadapi masyarakat serta membutuhkan pendataan yang akurat. Hal ini yang telah diusulkan lewat pemerintah daerah melalui PUPR sesuai persyaratan yang dipersyaratkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku., serta sebahagian kecil menyatakan bahwa permasalahan teknis sedikit terlalu menyulitkan masyarakat karena keterpenuhan syarat yang begitu ketat, namun demikian dengan keterbatasan jumlah dan permasalahan teknis tersebut dapat diantisipasi oleh pemerintah dan stakeholder dengan baik. Dari sisi ini keseluruhan permasalahan dan perilaku sasaran program dapat dinyatakan berjalan dengan baik, namun demikian sedikit mengalami masalah akan tetapi tidak berarti dan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pelibatan masyarakat lewat kelompok kerja oleh masyarakat itu sendiri dan telah berjalan dengan baik.

Dalam perspektif karakteristik kebijakan, sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan bahwa dari sisi isi kebijakan dapat dipahami oleh seluruh aparat pemerintah dan masyarakat khususnya penerima program BPS ini. Konteks isi kebijakan juga tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya dan instansi selaku stakeholders, dukungan ini diperkuat oleh ketersediaan dana dan material yang mudah dijangkau dengan ketersediaan pula regulasi baik teknis maupun operasionalnya. Dari beberapa hasil observasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa isi dan dukungan sumberdaya dikarenakan memiliki kejelasan aturan yang dipedomani oleh seluruh aparat yang terlibat termasuk masyarakat dengan satu komitmen yang dijalankan aparat dengan baik. Komitmen itu di wujudkan dengan adanya akses informasi yang diwujudkan dengan partisipasi langsung oleh masyarakat selaku penerima BPS. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik kebijakan ini telah terselenggara dengan baik.

Sementara aspek lingkungan kebijakan, menunjukkan bahwa dari sisi lingkungan kebijakan sebagai bagian yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan diluar peraturan dan perundang-undangan yang ada, menjadi factor yang dapat pula menentukan keberhasilan kebijakan. Lingkungan kebijakan dalam aplikasinya tetap memperhatikan kondisi social ekonomi masyarakat dimana pemerintah mampu menciptakan ruang dan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang homogeny, pelibatan masyarakat yang sudah mengakar dengan adat istiadat kebiasaan yang saling bekerjasama sehingga setiap program BPS diwilayah Kelurahan ini mampu diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta



didukung pula oleh komitmen dan keterampilan aparat memanfaatkan kondisi tersebut melalui pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan

Program bantuan stimulan perumahan swadaya sebagai sebuah kebijakan yang mampu memahami karakteristik masalah atas kelompok sasaran menunjukkan bahwa hal ini bermula pada teknis permasalahan yang dihadapi masyarakat serta membutuhkan pendataan yang akurat. Hal ini yang telah diusulkan lewat pemerintah daerah melalui PUPR sesuai persyaratan yang dipersyaratkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebahagian kecil menyatakan bahwa permasalahan teknis sedikit terlalu menyulitkan masyarakat karena keterpenuhan syarat yang begitu ketat, namun demikian dengan keterbatasan jumlah dan permasalahan teknis tersebut dapat diantisipasi oleh pemerintah dan stakeholder dengan baik.

Dalam konteks karakteristik kebijakan sebagaimana yang telah di uraikan di atas menunjukkan bahwa dari sisi isi kebijakan dapat dipahami oleh seluruh aparat pemernitah dan masyarakat khususnya penerima program BSPS ini. Konteks isi kebijakan juga tidak terlepas adanya dukungan sumber daya dan instansi selaku stakeholders, dukungan ini diperkuat oleh ketersediaan dana dan material yang mudah dijangkau dengan ketersediaan pula regulasi baik teksnis maupun operasionalnya.

Berkaitan dengan Lingkungan Kebijakan, penulis dapat uraikan sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya telah terlaksana dengan adanya dukungan kondisi social ekonomi masyarakat, dimana kondisi telah memanfaatkan teknologi dalam merealisasikan program sampai kepada pengerjaan teknis BSPS. Kondisi masyarakat yang homogen telah memudahkan karena didasari oleh kultur budaya, adat kebiasaan masyarakat yang berkembang secara turun temurun membuat gotongroyong telah berjalan, hal ini disebabkan karena sifatnya swadaya dan dikerjakan langsung oleh kelompok masyarakat. Kondisi masyarakat sebahagian telah meningkat kualitas ekonomi dan hidupnya sehingga pelibatan masyarakat turut serta membantu dan hal inilah yang diharapkan pemerintah dalam bentuk partisipasi.

Dalam konteks lingkungan kebijakan ini sebagaimana yang telah di uraikan di atas menunjukkan bahwa dari sisi lingkungan kebijakan sebagai bagian yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan diluar peraturan dan perundang-undangan yang ada, menjadi factor yang dapat pula menentukan keberhasilan kebijakan. Lingkungan kebijakan dalam aplikasinya tetap memperhatikan kondisi social ekonomi masyarakat dimana pemerintah mampu menciptakan ruang dan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang homogeny, pelibatan masyarakat yang sudah mengakar dengan adat istiadat kebiasaan yang saling bekerjasama sehingga setiap program BSPS diwilayah Kelurahan ini mampu diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Demikian pula kaitan dengan faktor pendukung serta hambatan dan upaya pemecahannya, dalam perspektif hambatan aspek sumber daya baik manusia maupun sarana pendukung selalu saja menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan program BSPS, hal ini disebabkan keterbatasan pemerintah, termasuk aspek keterpenuhan syarat calon penerima, kondisi lingkungan, social ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya yang dapat mendukung pembangunan wilayah kelurahan secara umum, hal ini belum maksimal partisipasi itu dapat diwujudkan dengan maksimal. Hal tersebut bahwa pada prinsipnya program ini telah diberdayakan akan tetapi pelibatan masyarakat ada dalam kelompok lingkungannya, termasuk masalah calon penerima dengan syarat yang menyulitkan masyarakat banyak diantara mereka tidak dapat memenuhi sehingga masih ditemukan hunian rumah ini belum layak di huni di Kelurahan tersebut.

Upaya aparat pemerintah dalam mengantisipasi sebuah permasalahan yang dihadapi dilapangan berkenaan dengan kebijakannya mengajak masyarakat secara bersama-sama pemerintah Kelurahan untuk mengantisipasi dan mengurus syarat administrasi kelengkapan berkasnya untuk dapat diusulkan calon penerima program BSPS tahun yang akan datang, kemudian terus mensosialisasikan pembangunan dari seluruh aspek dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memanfaatkan dan mengajak seluruh stakeholder untuk terlibat agar pembangunan di Kelurahan ini dapat direalisasikan



agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkatkan ekonomi sehingga masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan pada riset ini adalah telah diterapkannya kebijakan pemerintah berupa program BSPS, namun dalam proses pelaksanaannya cukup bermasalah. Sedangkan dalam aspek kebijakan, *support* sumberdaya dan instansi yang berhubungan langsung menunjukkan *result* bahwa pemerintah berpihak terhadap kebutuhan masyarakat berupa pemukiman yang memadai dan layak untuk ditinggali. Program BSPS ini pun dapat terlaksana dengan cepat dan tepat karena adanya dukungan dari segi kondisi ekonomi masyarakat, keterikatan dan kecakapan dalam bergotong-royong dalam membangun kebersamaan. Kemudian mengenai faktor determinan terkait kebijakan pemerintah yang mempengaruhi keberhasilan program BSPS dirasa dapat diatas dengan baik. Hal ini dikarenakan keterlibatan pemerintah kelurahan, *stakeholders* dunia bisnis dan masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu program BSPS.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari peneliti atas riset ini adalah peran pemerintah kelurahan, *stakeholder* serta masyarakat mesti dipertahankan dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah khususnya dalam program BSPS, karena dengan adanya hal tersebut maka program BSPS bisa tepat sasaran dan terlaksanakan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto.2008 “*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*” Gajah Mada University Press. Jogjakarta
- A.G.Subarsono, 2005 “Analisis Kebijakan Publik” (Konsep, Teori dan Aplikasinya) Pusta Belajar Yogyakarta
- Agustino Leo, 2020 “Dasar-dasar kebijakan Publik” Edisi Revisi Alfabeta Bandung
- Brata, Atep, Adya. ,*Dasar-Dasar pelayanan Prima*. 2004 (Cetakan kedua) Gramedia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989 ”*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Balai Pustaka
- Dwijowijoto, N. 2006 “*Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*” Jakarta : Elex media Komputindo.
- Edwards III, George C. (1980), “*Implemetation Public Policy*”, Congressional Quarterly Press, Washinton.
- Fredericson, 2007. “*Public Policy Bureacarcy A Introduction*” Englewood, Cliffs, NJ : Prentice Hall Inc.
- Hasibuan,S.P 2001.*Manajemen Sumber daya Manusia.(edisi revisi)*..Jakarta Bumi Aksara.
- Hasibuan, S.P Malayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara
- Harbani Pasolong, 2010 “*Teori Administrasi Publik*” Alfabeta Bandung.
- Miles, Matthew B, dan Huberman, A. Michel. 1992. “*Analisa Data Kualitatif* (Terjemahan Tjetjep Rohidi). Jakarta : UI Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman (lembaran negara nomor 101)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Permen PUPR nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan tatalaksana Kementerian PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466).
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D*” Bandung . Alfa Beta.
- Surat Edaran Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Thoha Miftah 2008. “ *Administrasi Publik Kontemporer*” Kencana Prenada Group Jakarta



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011., tentang perumahan dan kawasan pemukiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7 tambahan lembar negara nomor 5188.
Wiiliam N.Dunn, 2003. “ *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*” edisi kedua Gajah Mada University Press
Yogi Suprayogi Sugandi, 2011 “ *Administrasi Publik* “ Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu Yogyakarta.
Zulkarnaen, 2016 “Implementasi Kebijakan Bantuan Sirtimulus perumahan *swadaya* di Kecamatan Parigi”; Jurnal Nasional.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Copyright (c) 2023 Zul Fachry, Zul Fadli, Zul Rachmat, ZH Nurul Kusumawardhani, Nurhidayah



OPTIMALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DALAM MEMAJUKAN OBJEK PARIWISATA DI NEGERI SULI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

OPTIMIZATION OF INTEGRATED COASTAL AREA MANAGEMENT IN ADVANCEMENT OF TOURISM OBJECTS IN SULI STATE, SALAHUTU SUB-DISTRICT, CENTRAL MALUKU DISTRICT

Petronela Sahetapy

Universitas Pattimura
neetycorputty@gmail.com

Abstrak

Tema sentral penelitian ini mengarah pada optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang mana terfokus pada masalah yang dihadapi bahwa belum optimal pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata yang tampak dari sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang belum memadai, yakni selama ini pengelolaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 22 orang, Disamping teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan akan dideskripsikan dengan bantuan tabel frekuensi dan kriteria interpretasi skor persentase maupun dukungan kategori penilaian untuk mengetahui besar kecilnya dukungan responden dan nilai yang diperoleh dan secara terakumulasi nilai skor yang diperoleh dalam perhitungan persentase dan inerpertasinya tetap mengacu pada kesesuaiannya dengan kriteria interpretasi skor. Besaran nilai CRR/SA dan Nilai ISP bersifat relatif searah sesuai dengan peluang penetapan prioritas, yang dimulai dari nilai ISP yang terendah secara berurutan ke nilai ISP yang tertinggi untuk dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasi hasilnya yakni, merencanakan diprioritaskan pertama, dan mengorganisir diprioritaskan ke dua, sementara menggerakkan dan mengawasi diprioritaskan secara bersamaan sebagai prioritas ketiga dan diharapkan dalam tindak lanjutnya dapat terlaksana dengan baik guna pengembangan pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, Wilayah Pesisir, Objek Pariwisata.

Abstract

The central theme of this research leads to optimizing the management of coastal areas in an integrated manner in advancing tourism objects in Negeri Suli, Salahutu District, and Central Maluku Regency, which focuses on the problems faced that are not yet optimal in the integrated management of coastal areas in advancing tourism objects, which can be seen from the facilities and infrastructure as well as inadequate supporting facilities, namely that so far the management has not been in accordance with what is expected. As a descriptive study with a total sample of 22 people, in addition to data analysis techniques carried out quantitatively, the results will be described with the help of frequency tables and percentage score interpretation criteria, as well as assessment category support to determine the size of the respondent's support and the value obtained. The accumulated score value obtained in the



calculation of the percentage and its interpretation still refers to its conformity with the score interpretation criteria. The CRR/SA value and ISP score are relatively unidirectional according to the opportunity for prioritization, starting from the lowest ISP value sequentially to the highest ISP value for improvement and strengthening in optimizing the results, namely, planning is prioritized first, and organizing is prioritized second, while mobilizing and supervising are prioritized simultaneously as the third priority, and it is hoped that the follow-up can be carried out properly for the development of tourism in Negeri Suli, Salahutu District, and Central Maluku Regency..

Keywords : *Optimization, Management, Coastal Areas, Tourism Objects.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah pesisir adalah salah satu wilayah yang indah dan memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan dan perlu dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan pariwisata. Pendekatan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata merupakan esensi dari pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat (Adikampana, 2017). Pendekatan ini memiliki nilai strategis yaitu mampu menciptakan produk wisata yang bercirikan budaya setempat. Pariwisata jika dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi ekonomi secara langsung kepada masyarakat di sekitar daerah pariwisata. Sehingga secara tidak langsung pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah (Rusyidi & Fedryansah, 2018).

Negeri Suli merupakan salah satu dari beberapa negeri yang menjadi destinasi wisata di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki obyek wisata yang perlu dikembangkan guna dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan Pendapatan Desa/Negeri dan menunjang Pendapatan Asli Daerah. Negeri Suli memiliki beberapa kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah obyek tujuan wisata karena didukung topografi wilayah dataran tinggi (Suli Atas) dan rendah (Suli Bawah) dekat dengan pantai yang diarahkan sebagai kawasan pesisir pendukung pariwisata.

Negeri Suli telah dikenal dengan wisata pantainya, yakni Pantai Natsepa dan Pantai Sopapei yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan luar dan lokal. Kedua tempat wisata pesisir ini telah terkenal dan menjadi kebanggaan Pemerintah Negeri Suli dan masyarakat setempat. Sekalipun itu, masih ada banyak kekurangan yang terlihat jika ditinjau lebih jauh, yakni sarana dan prasarannya belum memadai dan membutuhkan pembenahan. Ini harus cepat dilakukan mengingat letaknya sangat strategis, terutama Pantai Natsepa yang letaknya tepat di depan jalan provinsi yang merupakan jalan utama di Negeri Suli yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, sehingga pentingnya menjadi perhatian pemerintah untuk dapat memprioritaskan pembangunan pariwisatanya yang ditunjang dengan manajemen pengelolaan pariwisata yang mumpuni.

Dengan demikian perlu pengelolaan wilayah pesisir yang dibarengi sarana dan prasarana pariwisata yang memadai sehingga dapat memajukan objek wisata yang ada di Negeri Suli. Tentu hal ini sangat membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk dapat wewujudkannya dengan baik. Namun yang menjadi kendala selama ini adalah belum terwujudnya kerjasama antara ketiga pihak untuk memajukan pembangunan pariwisata di Negeri Suli. Sementara masyarakat sampai saat ini sangat mengharapkan akan kelengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung objek wisata. Disamping wilayah pesisir perlu ditata sesuai dengan kebutuhan dan keindahan objek wisata yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh akan hal ini, akan dibuktikan melalui penelitian ini yang dilakukan secara langsung di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.



METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Definisi dan Operasional Variabel

Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata melandasi pada pengelolaan yang menggerakkan setiap orang atau sekelompok orang dengan menggunakan metode ilmiah serta dibantu sumber tertentu manajemen dan mengoperasikan fungsinya dalam mengakomodir setiap kegiatan, yakni: 1) Merencanakan, 2) Mengorganisir, 3) Menggerakkan, dan Mengawasi (Winardi 2005). Secara operasional terlihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Operasional Variabel

No.	Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Memajukan Objek Pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah	
	Aspek-aspek Pengukuran	Instrumen (Kuesioner)
		Item
1.	Merencanakan	1,2,3,4,5,6,7
2.	Mengorganisir	8,9,10,11,12,13
3.	Menggerakkan	14,15,16,17,18,19
4.	Mengawasi	20,21,22,23,24

Sumber: Winardi (2010)

Terkait operasional variabel tersebut, maka pengukurannya dilakukan melalui item-item pertanyaan dalam bentuk pernyataan adalah dengan menggunakan empat poin Skala Likert, dimana jika terdapat jawaban dengan bobot rendah, maka diberikan skor 1 (satu) dan seterusnya sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberikan skor 3 (tiga). Kategori dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut: a) Mendukung (M) = 3; b) Kurang Mendukung (KM) = 3; c) Tidak Mendukung (TM) = 1.

Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan berlokasi di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang dilandasi oleh masalah yang terjadi sebagai suatu fenomena dilokasi penelitian. Posisi lokasi penelitian dijangkau dan diteliti. Kiranya dalam proses penelitian berlangsung dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan penelitian dilaksanakan sehingga terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 1) Pemerintah Negeri Suli; 2) Masyarakat pesisir di lingkungan wisata; 3) Masyarakat yang berjualan di tempat wisata; 4) Wisatawan; dan 5) Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah. Demikian pengambilan sampel secara jenuh terhadap Pemerintah Negeri yang berjumlah 8 orang, Unsur masyarakat dan wisatawan diambil secara insidental, yakni masyarakat pesisir di lingkungan wisata dengan ketetapan 4 orang, begitu pula dengan masyarakat yang berjualan di tempat wisata dengan ketetapan 4 orang, dan wisatawan yang berkunjung dengan ketetapan yang sama 4 orang. Sementara pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah di ambil secara purposive sebanyak 2 orang pegawai. Demikian sampel yang berjumlah 22 orang yang dimaksudkan, dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.



Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang terpercaya bagi pengumpulan data sangat menentukan keabsahan/kesahihan suatu penelitian. Data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, antara lain:

1. Data primer bersumber atau diperoleh dari responden, akan dikumpulkan melalui suatu penelitian lapangan dan diharapkan responden dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat saat ini tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Data sekunder akan dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, untuk memperoleh data/informasi dari buku-buku yang terkait dengan substansi penelitian, dan penelusuran dokumentasi serta laporan yang terkait pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan teknik pengumpulan data dan wujud data yang akan dikumpulkan, maka dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, untuk memperoleh keterangan ilmiah dari buku-buku, dokumen, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan, yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dalam mengumpulkan data dengan cara :
 - a. Observasi, yakni pengamatan dilakukan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
 - b. Wawancara untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari observasi ataupun dokumen, yakni wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, yakni memberikan pertanyaan tertulis secara tertutup disertai dengan alternatif jawaban tentang sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan peneliti tetap bersikap positif dan objektif dari awal sampai akhir untuk kepentingan perolehan data tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Teknik Analisis Data

Guna kepentingan analisis data menyangkut dengan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, maka teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan dideskripsikan dengan bantuan tabel frekuensi dan kriteria interpretasi skor persentase maupun dukungan kategori penilaian untuk mengetahui besar kecilnya dukungan responden dan nilai yang diperoleh dan secara terakumulasi nilai skor yang diperoleh dalam perhitungan persentase dan interpretasinya tetap mengacu pada kesesuaiannya dengan kriteria interpretasi skor (Riduwan, 2003:41). Selanjutnya dikonversikan untuk melakukan penafsiran data dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan akhir berdasarkan nilai penetapan prioritas dengan memperlihatkan bahwa sesuai atau tidaknya subjek yang dipilih secara sosiometrik, yaitu perhitungan Indeks Status Pilihan (ISP) (Nazir, 2003:369). Melalui teknik analisis sosiometrik ISP, diharapkan dapat mewujudkan sosiogram yang jelas dan tepat bagi tindak lanjut bagi optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Penyajiannya memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi metode, reliabilitas serta validitas instrument yang digunakan dalam penelitian. Perlu juga dijelaskan bagaimana ragam populasi yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta proses sampling yang dilakukan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Singkat Pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah

Dalam perkembangan pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tidak terlepas dari rencana penetapan batas wilayah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata, yakni batas Timur antara Suli dan Tial, dan satunya itu Suli dan Tulehu, batas Barat antara Paso sampai jembatan Waitatiri itu secara administratif, wilayah Waitatiri Natsepa sampai dengan yang baru dibangun adalah *Baby Beach* itu masuk dalam petualangan Negeri Suli. Jadi dari Waitatiri, *Water Boom* kemudian Baguala *Resort* lari ke Natsepa Satu, Natsepa Dua terus ke Sopapei itu agak sedikit panjang. Kemudian dari objek wisata yang disebutkan itu ada Telaga Cinta di Suli atas sampai ke tempat panen sagu di pinggir jalan dekat *Baby Beach* itu adalah batas terakhir antara Suli dan Tial, yang merupakan merupakan wilayah petuanan Negeri Suli.

Dalam sistem pengelolaan, untuk *Water Boom* dikelola oleh pengusaha keturunan cina, dan Natsepa Satu dikelola oleh Keluarga Manuputty dan penginapan-penginapan itu milik pribadi, sementara Natsepa Dua di bagian dalam dikelola langsung oleh Pemda Maluku Tengah karena milik Pemda Maluku Tengah yang dibeli langsung dari pemilik pribadi dan pelepasan hak dari pemilik Keluarga Matitawael di Negeri Suli ke Pemda Maluku Tengah. Yang termasuk tinjauan Pemda Maluku Tengah hanya yang terdapat dalam wilayah pantai Natsepa Dua sejak 2007 atau 2008 hingga sekarang. perumahan yang ada di dalam itu adalah tempat ganti milik Pemda Maluku Tengah, kalau penginapan itu sudah di luar, jadi pembangunan di dalam itu ada sebagian milik Pemda Maluku Tengah dan ada sebagian milik pribadi. Batas antara milik Pemda Maluku Tengah dan masyarakat ada pada penginapan itu, disebelahnya milik keluarga Haliwela, dan penginapan milik keluarga, dan disebelahnya lagi pembangunan yang sementara dibuat tetapi karena gempa sehingga dihentikan sampai sekarang dan pemilik modal pembangunan itu adalah pengusaha keturunan Cina Suli. Sedangkan yang jualan di luar itu sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah negeri. Jadi yang di luar itu tidak termaksud dalam tinjauan pemda.

Sementara itu, Pantai Sopapei sebagian kecil telah dijual kepada Wijaya seorang pengusaha keturunan Cina sampai di batas tembok dan dikelola secara pribadi. Tetapi sebagian besar dari Pantai Sopapei tidak dijual kepada Pengusaha Keturunan Cina, ada yang dikelola langsung oleh pemilik lahan. Sekarang areanya sudah diperluas, malahan sekarang yang punya milik pribadi sudah mulai diperluas sampai ke tengah Negeri Suli. Dibelakang Gereja Suli Bawah setiap hari libur sekarang sudah ada yang datang berwisata disitu, karena disitu ada salah satu tempat wisata yang dikelola oleh Keluarga Salampessy, areanya dari Pantai Sopapei balik kiri mentok di ujung jalan itu baru dikelola oleh pemiliknya Keluarga Salampessy. Tepat di belakang Gereja Suli Bawah ada permandian air panas, mentok disitu ada gedung serbaguna, kemudian ada kali Norihua. Dulu tim peneliti turun mencari sumber panas bumi untuk pembangkit listrik panas bumi, sekarang mereka cari geotermal punya diantara Negeri Suli dan Negeri Tulehu dan di sebelahnya milik UKIM, lalu tempat bor itu mereka turun ke bawah. Jadi setelah sumur itu di boring keluar air panas jadi air panas itu keluar tanpa mesin pengisap jadi keluar sendiri sehingga masyarakat membuat bak, namun tidak terawat dengan baik sehingga mereka aliri dengan pipa sampai ke talit di pasang perpipaan sehingga mandi bisa di pakai dibagian perpipaan tempat keluarnya air panas.

Secara keseluruhan yang terpenting bagi Negeri Suli khususnya di bagian bawah, adalah bagaimana bisa merubah pemikiran masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan pesisir, jangan buang sampah di pantai karena kebanyakan yang terjadi bagian pantai jika disapu kemudian sampah lalu diangkat buang ke pantai, terkadang bukan hanya daun-daun yang dibuang tetapi segala macam apalagi sampah plastik banyak dibuang, ini harus dirubah pemikiran masyarakat sekitar untuk bagaimana menjaga kebersihan, dan bagaimana menjaga ketertiban.

Mencegah terjadinya abrasi yang dapat memperburuk keadaan sekitar pantai karena abrasi sudah cukup jauh, oleh sebab itu pemerintah menangani sehingga tidak sampai terjadi abrasi lebih parah yang dapat menyebabkan rumah-rumah warga terkikis. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan talut di pesisir pantai, mulai dari Mandalise sampai mau dapat Pantai Sopapei untuk melindungi pemukiman secara keseluruhan. Jika itu tidak dilakukan dua sampai empat tahun yang lalu, pasti rumah



sekitar pantai terkena dampak abrasi dan sebagian tidak bisa tinggal sehingga harus pindah tempat pemukiman, itu kondisi yang terjadi dan hanya bisa bersyukur karena akhirnya rumah-rumah masih tetap ada dan terlindung dari talut yang telah dibuat. Rumah-rumah yang ada disekitar itu mulai menjaga kebersihan sehingga mendatangkan orang untuk berwisata ditempat yang baru dan untuk itu pola pikir masyarakat berubah kearah itu. Suatu ketika masyarakat Negeri Suli yang tinggal di bagian bawah tidak perlu membawa jualan ke Natsepa lagi, mereka hanya bisa keluar dari rumah turun ke pantai dan bisa berjualan di situ.

Pada prinsipnya orang memahami bahwa pendapatan Negeri Suli cukup besar dengan adanya objek wisata seperti yang telah disebutkan itu. Namun selama ini Pemerintah Negeri Suli belum *ambel ngase* (retribusi) dari tempat wisata, *ngase* baik dari pengelolaan Galian C tidak pernah ada, itu merupakan pendapatan PAD hasil dari Negeri Suli. Saat ini Staf Negeri Suli sementara membuat rancangan program, rancangan peraturan, oleh karena belum ada Peraturan Negeri (PERNEG). Rancangan ini atas kerja sama dengan fakultas ekonomi UKIM, yang mana rancangan drafnya baru dibuat bersama terkait dengan bangunan yang sementara di bangun harus dibahas secara tersendiri baru dikirim kembali ke kabupaten sebab ada hal-hal yang belum bisa dilakukan karena belum ada PERNEG, dan harus dibahas di Saniri Negeri Suli dulu kemudian baru dikirim ke Kabupaten Maluku Tengah. Demikian dalam rangka pengelolaan itu kalau sudah ada dasar hukumnya merupakan Peraturan Negeri (PERNEG) itu berarti PAD dalam rancangan untuk satu tahun itu diperkirakan 500 juta ke atas itu minimal dalam peraturannya.

Masyarakat pelaku usaha yang berjualan di dalam kompleksnya pemda itu semua bayar ke pemda kecuali yang tidak masuk di area pemda. Selama ini tidak ada koordinasi antara pemda dan pemerintah negeri. Jadi dari dahulu menurut mantan Raja yang berproses waktu itu menyangkut pembagian hasil yang dimaksud ada dalam peraturan daerah provinsi, padahal tidak ada realisasi apa-apa. Jadi sebenarnya ada sistem pembagian hasilnya sampai saat ini. Sebenarnya pihak Negeri Suli merasa rugi tetapi harusnya Pemda Maluku Tengah menyikapi peraturan daerah Provinsi menyangkut pembagian hasil. Namun sebenarnya tidak menuntut lebih daripada itu. Diharapkan anggota-anggota dewan dapat mengedepankan itu tetapi tidak juga disikapi dan tindak lanjut dengan baik. Harusnya diperjuangkan karena itu menjadi aset negeri terutama yang berada di depan jalan merupakan aset pemerintah negeri dan perlu merubah pola pikir masyarakat.

Negeri Suli ini masih diperintah oleh pejabat dari tahun 2012 sampai sekarang. Secara histori, Negeri Suli pernah diperintah oleh keluarga da Costa paling lama padahal mereka bukan masyarakat adat, tetapi karena pendekatan mereka sama penjajah dan bagian dari orang Portugis, makanya mereka mempercayakan memimpin, makanya sejarah itu hilang karena keluarga da Costa memimpin Negeri Suli sangat lama.

Dari tahun 2012 sampai sekarang belum dilakukan pemilihan Raja karena masih kabur tentang sejarah sebenarnya siapa yang menjadi Raja, sehingga Pemerintah Negeri Suli kerjasama dengan Prof.S. Nirahua, M.Hum yang membantu dalam proses penyusunan PERNEG, menyangkut mata rumah perintah. Jadi dalam Negeri Suli ini berhak mencalonkan anak soa dari empat soa yang ada, yakni masing-masing mencalonkan bakal calonnya. Sebenarnya pada tanggal 4 Mei 2020 sudah dilaksanakan pemilihan tetapi karena pandemi pemerintah membatalkan, setelah pandemi pertama covid-19 di awali dengan katong sudah beribadah tapi karena ada kendala-kendala tertentu sehingga terhambat sampai sekarang. Sebenarnya panitia sudah bekerja, sudah dibentuk dari awal 2020 dan untuk tindak lanjutnya perlu kerja keras Panitia Pemilihan Raja sehingga terpilih Raja Negeri Suli sebagai kepala pemerintahan definitif sehingga dapat memimpin Negeri Suli dengan baik dan dapat mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang menunjang sektor pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Karakteristik Responden

Dalam penelitian pengumpulan data melalui pengisian identitas responden adalah sangat penting dan bermanfaat dalam menggambarkan karakteristik responden. Maka sesuai dengan data yang terampungkan dideskripsikan meliputi jenis kelamin, usia, dan pendidikan diuraikan pada tabel 5 di bawah ini.



Tabel 5. Karakteristik Responden

NO.	Uraian	F				(%)			
		PN	MSY	WS	PP	PN	MSY	WS	PP
I.	Jenis Kelamin								
	1. Laki – Laki	6	5	2	2	27	23	9	9
	2. Perempuan	2	3	2	-	9	14	9	-
	Jumlah	8	8	4	2	38	37	18	9
II.	Usia								
	1. Kurang dari 30 Tahun	-	2	1	-	-	9	4	-
	2. 31-40 Tahun	-	4	2	1	-	18	9	4
	3. 41-50 Tahun	-	2	1	1	-	9	4	4
	4. Diatas 50 Tahun	8	-	-	-	32	-	-	-
Jumlah	8	8	4	2	32	36	17	8	
III.	Pendidikan Terakhir								
	1. SMA/Sederajat	6	4	1	-	27	18	4	-
	2. Strata Satu (S1)	1	3	2	2	4	14	9	9
	3. Strata Dua (S2)	1	1	1	-	4	4	4	-
	Jumlah	8	8	4	2	35	36	17	9

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Data tabel di atas menggambarkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang (68%), yang terdiri dari Pemerintah Negeri (PN) 6 orang 27%, Masyarakat (MSY) yakni masyarakat pesisir di lingkungan wisata; dan masyarakat yang berjualan di tempat wisata sebanyak 5 orang 23%, dan Wisatawan (WS) sebanyak 2 orang 9% serta Pegawai Pariwisata (PP) sebanyak 2 orang 9%. Selain itu responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang (32%), antara lain Pemerintah Negeri (PN) 2 orang 9%, dan Masyarakat (MSY) yang tidak lain adalah masyarakat pesisir di lingkungan wisata dan masyarakat yang berjualan di tempat wisata sebanyak 3 orang 14%, dan Wisatawan (WS) sebanyak 2 orang 9%, sementara Pegawai Pariwisata (PP) tidak ada yang berjenis kelamin perempuan.

Kemudian responden dengan tingkat usia kurang dari 30 tahun sebanyak 3 orang (14%) yang terdiri dari Masyarakat (MSY) pesisir di lingkungan tempat wisata dan yang berjualan di tempat wisata sebanyak 2 orang 9%, sementara Pemerintah Negeri dan Pegawai Pariwisata tidak ada yang usianya di bawah 30 tahun. Sedangkan responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 7 orang (32%), diantaranya masyarakat (MSY), yakni masyarakat pesisir di lingkungan wisata dan yang berjualan di tempat wisata sebanyak 4 orang 18%, disamping Wisatawan (WS) sebanyak 2 orang 9% dan Pegawai Pariwisata (PP) 1 orang 4%, sementara yang tidak berada dalam kisaran usia tersebut, yaitu Pemerintah Negeri. Selain itu responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 4 orang (18%), yang mana Masyarakat (MSY), yakni masyarakat pesisir di lingkungan wisata dan yang berjualan di tempat wisata sebanyak 2 orang 9%, Wisatawan (WS) 1 orang 4% dan Pegawai Pariwisata (PP) juga 1 orang 4%, sedangkan Pemerintah Negeri (PN) tidak ada yang tergolong dalam rentangan usia tersebut. Sementara responden yang berusia diatas 50 tahun ke atas sebanyak 8 orang (32%), yakni semuanya adalah Pemerintah Negeri, sedangkan Masyarakat (MSY) baik masyarakat pesisir di lingkungan wisata maupun yang berjualan di tempat wisata, Wisatawan (WS) dan Pegawai Pariwisata (PP) tidak berada dalam kategori usia yang dimaksud.

Selanjutnya tingkat pendidikan terakhir responden bervariasi, yakni responden yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 11 orang (50%) yang terdiri dari Pemerintah Negeri 6 orang 27%, dan Masyarakat (MSY), yaitu masyarakat pesisir di lingkungan wisata maupun yang berjualan di tempat wisata sebanyak 4 orang 18%, dan Wisatawan (WS) 1 orang 4%, sementara yang tidak termasuk pada jenjang pendidikan terakhir tersebut adalah Pegawai Pariwisata (PP). Adapun responden yang berpendidikan S1 sebanyak 8 orang (32%), diantaranya Pemerintah Negeri (PN) 1 orang 4% dan Masyarakat (MSY) yang tidak lain adalah masyarakat pesisir di lingkungan wisata maupun yang berjualan di tempat wisata sebanyak 3 orang 14%, dan Wisatawan (WS) sebanyak 2 orang 9%, begitupun dengan Pegawai Pariwisata (PP) sebanyak 2 orang (9%). Terakhir responden yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang (14%), yaitu Pemerintah Negeri 1 orang 4%, Masyarakat (MSY) khususnya masyarakat pesisir di lingkungan wisata 1



orang 4% dan juga Wisatawan (WS) 1 orang 4%, sementara Pegawai Pariwisata tidak termasuk dalam jenjang pendidikan terakhir yang dimaksud.

Bertolak dari karakteristik responden tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa dari segi jenis kelamin responden laki-laki lebih dominan dari responden perempuan. Sementara dari segi usia kebanyakan responden sudah tergolong dalam rentang usia non produktif terutama Pemerintah Negeri (PN), dan dari segi pendidikan terakhir banyak yang berpendidikan SMA. Namun perlu diakui bahwa didukung pula dengan responden yang berpendidikan S1 dan S2 baik Pemerintah Negeri (PN), Masyarakat (MSY), Wisatawan (WS), dan Pegawai Pariwisata (PP). Dengan corak karakter responden yang dimiliki tentu diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang lengkap dan menunjang penelitian ini dalam capaian tujuan dan hasil yang diharapkan.

Tanggapan Responden

Sesuai dengan data yang diperoleh melalui instrument yang digunakan meluputi aspek-aspek pengukuran dari optimalisasi engelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dapat dikemukakan padatable 6di bawah ini.

Tabel 6. Persentase Tanggapan Responden

Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Memajukan Objek Pariwisata Di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah			
Aspek-Aspek Pengukuran	Persentase Tanggapan Responden		
	M	KM	TM
A. Merencanakan			
Pernyataan	3	2	1
1. Aktor-aktor merencanakan penetapan batas wilayah pengelolaan wisata	14 64%	6 27%	2 %
2. Aktor-aktor menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan	16 73%	5 23%	1 4%
3. Aktor-aktor memastikan kegiatan pembangunan wisata tidak mangalami kendala	12 54%	9 41%	1 4%
4. Aktor-aktor memperhitungkan dampak kumulatif pembangunan wisata	14 64%	6 27%	2 %
5. Aktor-aktor mengetahui batasan pembangunan wisata secara fisik tidak menimbulkan ancaman	12 54%	9 41%	1 4%
6. Penda menyikapi dan mendukung rencana kegiatan pembangunan wisata	15 68%	5 23%	2 9%
B. Mengorganisir			
Pernyataan	3	2	1
1. Aktor-aktor mengorganisir tugas-tugas dalam penetapan batas wilayah pengelolaan wisata	12 54%	8 36%	2 9%
2. Aktor-aktor menyepakati keputusan dalam menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan	15 68%	5 23%	2 9%
3. Aktor-aktor terkonsentrasi dalam memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan objek wisata	17 77%	3 14%	2 9%
4. Aktor-aktor terobsesi dalam menyikapi batasan pembangunan kondisi fisik yang menimbulkan kendala	13 59%	7 32%	2 9%
5. Aktor-aktor termotivasi dalam mempromosikan perbaikan wilayah pesisir	15 68%	6 27%	1 4%
6. Penda menyikapi dan mendukung organisir kegiatan pembangunan wisata	12 54%	9 41%	1 4%



C. Menggerakkan		M	KM	TM
Pernyataan		3	2	1
1. Aktor-aktor yang berwenang menggerakkan dan menetapkan batas wilayah pengelolaan wisata		16	4	2
		73%	18%	9%
2. Aktor-aktor terkoordinir dalam melengkapi sarana/prasarana wisata		13	7	2
		59%	32%	9%
3. Aktor-aktor diarahkan untuk memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan wisata		15	6	1
		68%	27%	4%
4. Aktor-aktor diberikan petunjuk untuk mengetahui batasan pembangunan fisik yang menimbulkan ancaman		12	9	1
		54%	41%	4%
5. Aktor-aktor disuport untuk mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata		14	6	2
		64%	27%	9%
6. Pemda menyikapi dan mendukung gerakan kegiatan pembangunan wisata		17	4	1
		77%	18%	4%
D. Mengawasi		M	KM	TM
Pernyataan		3	2	1
1. Aktor-aktor mengawasi batas pengelolaan objek wisata		13	7	2
		59%	32%	9%
2. Aktor-aktor memantau sarana/prasarana wisata		16	5	1
		73%	23%	4%
3. Aktor-aktor mengendalikan kegiatan pembangunan objek wisata		12	9	1
		54%	41%	4%
4. Aktor-aktor mendampingi setiap kegiatan mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata		15	6	1
		68%	27%	%
5. Pemda menyikapi dan mendukung awasi kegiatan pembangunan wisata		17	4	1
		77%	18%	4%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dari aspek merencanakan mendapat dukungan positif dari responden sebesar 64% yang menyatakan aktor-aktor merencanakan penetapan batas wilayah pengelolaan wisata, 73% menyatakan aktor-aktor menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan, 54% menyatakan aktor-aktor memastikan kegiatan pembangunan wisata tidak mengalami kendala, 64% menyatakan aktor-aktor memperhitungkan dampak kumulatif pembangunan wisata, dan 77% menyatakan Pemda menyikapi dan mendukung rencana kegiatan pembangunan wisata 68%.

Dari aspek mengorganisir memperoleh dukungan positif dari responden sebesar 54% yang menyatakan aktor-aktor mengorganisir tugas-tugas dalam penetapan batas wilayah pengelolaan wisata, 68% menyatakan aktor-aktor menyepakati keputusan dalam menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan, 77% menyatakan aktor-aktor terkonsentrasi dalam memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan objek wisata, 59% menyatakan aktor-aktor terobsesi dalam menyikapi batasan pembangunan kondisi fisik yang menimbulkan kendala, 68% menyatakan aktor-aktor termotivasi dalam mempromosikan perbaikan wilayah pesisir, dan 54% menyatakan Pemda menyikapi dan mendukung organisir kegiatan pembangunan wisata.

Dari aspek menggerakkan mendapat dukungan positif dari responden sebesar 73% yang menyatakan aktor-aktor yang berwenang menggerakkan dan menetapkan batas wilayah pengelolaan wisata, 59% menyatakan aktor-aktor terkoordinir dalam melengkapi sarana/prasarana wisata, 68% menyatakan aktor-aktor memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan wisata, 54% menyatakan aktor-aktor diberikan petunjuk untuk mengetahui batasan pembangunan fisik yang menimbulkan ancaman, 64%



menyatakan aktor-aktor disuport untuk mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata, dan 77% menyatakan Pemda menyikapi dan mendukung gerakan kegiatan pembangunan wisata.

Dari aspek mengawasi memperoleh dukungan positif dari responden sebesar 59% yang menyatakan aktor-aktor mengawasi batas pengelolaan objek wisata, 73% menyatakan aktor-aktor memantau sarana/prasarana wisata, 54% menyatakan aktor-aktor mengendalikan kegiatan pembangunan objek wisata, 68% menyatakan aktor-aktor mendampingi setiap kegiatan mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata, dan 77% menyatakan Pemda menyikapi dan mendukung awasi kegiatan pembangunan wisata.

Pembahasan Merencanakan

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata yang dilakukan dengan baik bertumpu pada masyarakat, pemerintah, dan pengusaha yang memiliki kontribusi yang relatif sama secara moralitas dalam pengembangan pariwisata. Tentu dalam pengembangan dan pengelolaannya diawali dengan suatu perencanaan yang matang untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Perencanaan berarti tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti (Winardi, 2010). Agar perencanaan efektif harus mampu melihat setiap aspek dari sebuah persoalan dan juga mengerti atau memahaminya secara keseluruhan (Meredith *et.al.*, 1996:59). Kebanyakan orang, karena terlihat dalam kegiatan khusus dan terbatas, hanya dapat melihat bagian-bagian dari persoalan. Ditangan pengelola terletak tantangan untuk memadukan semua bagian itu sehingga menjadi suatu pandangan yang menyeluruh atas persoalan tersebut.

Dengan demikian bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dilakukan melalui suatu perencanaan yang matang. Hasil penelitian membuktikan bahwa akumulasi persentase skor yang dicapai dari aspek merencanakan sebesar 57%, yakni aktor-aktor merencanakan penetapan batas wilayah pengelolaan wisata, menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan, memastikan kegiatan pembangunan wisata tidak mangalami kendala, memperhitungkan dampak kumulatif pembangunan wisata, dan Pemda menyikapi dan mendukung rencana kegiatan pembangunan wisata telah diwujudkan dan berada pada interval 50 – 60%.

Mengorganisir

Setelah perencanaan dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata sebagaimana ditetapkan arah serta susunan dari pada tindakan masa yang akan datang, maka langkah berikut untuk melaksanakan pekerjaan adalah membagi-bagi komponen-komponen aktivitas kerja antara anggota-anggota kelompok dan mencatat bantuan masing-masing anggota kelompok tersebut. Ini merupakan cara terbaik menurut Eppler (2007), bahwa untuk menganalisis pekerjaan dan perubahan yang ada terutama jenis (struktural atau siklus), pola, serta relevansinya dengan organisasi. Aktivitas-aktivitas komponen tersebut dibagi sedemikian rupa hingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengeluaran seminimal mungkin atau dicapainya kepuasan kerja pekerja yang maksimal. Tugas membagi pekerjaan dan penetapan hubungan serta tindakan mempertahankan hubungan yang dikenal sebagai “pengorganisasian” yang merupakan keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara teratur, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan.

Pengorganisasian adalah tindakan mendistribusi pekerjaan antar kelompok yang ada dan menetapkan dan memerinci hubungan-hubungan yang diperlukan (Winardi, 2010). Untuk itu bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dilakukan melalui suatu pengorganisasian yang matang. Hasil penelitian membuktikan bahwa akumulasi persentase skor yang dicapai dari aspek mengorganisir sebesar 63%, yakni aktor-aktor mengorganisir tugas-tugas dalam penetapan batas wilayah pengelolaan wisata, menyepakati keputusan dalam menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan, terkonsentrasi dalam memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan objek wisata, terobsesi dalam menyikapi batasan pembangunan kondisi fisik yang menimbulkan kendala, termotivasi dalam mempromosikan perbaikan wilayah pesisir,



dan Pemda menyikapi dan mendukung organisir kegiatan pembangunan wisata telah diwujudkan dan berada pada interval 61 – 70%.

Menggerakkan

Guna menjalankan aktivitas-aktivitas secara fisik yang timbul karena langkah-langkah perencanaan serta pengorganisasian yang dilakukan, maka perlu melakukan tindakan-tindakan yang memulai dan melanjutkan tindakan-tindakan yang diperlukan agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diemban. Dalam hal ini, penggerakkan dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu guna memajukan objek pariwisata. Untuk itu, dalam prosesnya beroperasi secara kreatif dan dinamis dengan memperhitungkan resiko yang ada dan selalu mencoba cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu (Pranoto dan Suprpti, 2003). Cara-cara yang ditempuh memimpin, mengembangkan para pengelola, memberikan instruksi, membantu para anggota untuk memperbaiki hasil pekerjaan dan diri mereka sendiri melalui kreativitas mereka masing-masing dan tindakan memberikan kompensasi. Pekerjaan demikian dinyatakan sebagai tindakan “menggerakkan” yang meliputi seluruh elemen organisasi dalam menjalankan tugas yang diembankan.

Menggerakkan berarti merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara enthusias (Winardi, 2010). Oleh sebab itu bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan melalui suatu pengorganisasian yang matang. Hasil penelitian membuktikan bahwa akumulasi persentase skor yang dicapai dari aspek menggerakkan sebesar 66%, yakni aktor-aktor yang berwenang menggerakkan dan menetapkan batas wilayah pengelolaan wisata, terkoordinir dalam melengkapi sarana/prasarana wisata, memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan wisata, diberikan petunjuk untuk mengetahui batasan pembangunan fisik yang menimbulkan ancaman, disuport untuk mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata, dan Pemda menyikapi dan mendukung gerakan kegiatan pembangunan wisata telah diwujudkan dan berada pada interval 60 – 70%.

Mengawasi

Salah satu langkah akhir yang penting adalah pengawasan dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu guna memajukan objek pariwisata. Para pengelola menganggap perlu untuk mengecek atau mengontrol apa yang telah dilaksanakan untuk mencapai kepastian bahwa pekerjaan pihak lain berlangsung dengan memuaskan kearah pencapaian sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini oleh Etzioni (1985:8) dinyatakan sebagai bagian dari tujuan yang dikehendaki pada masa yang akan datang yang senantiasa dikejar agar dapat direalisasikan. Kadang-kadang waktu pekerjaan sedang berlangsung timbul adanya diskrepansi-diskrepansi, hal-hal yang sulit dipecah-pecahkan, salah pengertian dan gangguan-gangguan yang tidak diduga semula, dan hal tersebut cepat harus disampaikan kepada pihak pengelola, agar ia dapat melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan. Fungsi demikian dikenal sebagai “pengawasan”, yakni proses kegiatan pengelola untuk memastikan dan menjamin bahwa tindakan-tindakan pencapaian tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Mengawasi berarti mengawasi aktivitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana-rencana (Winardi, 2010). Oleh karena itu, bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan melalui suatu pengawasan yang matang. Hasil penelitian membuktikan bahwa akumulasi persentase skor yang dicapai dari aspek menggerakkan sebesar 66%, yakni aktor-aktor mengawasi batas pengelolaan objek wisata, memantau sarana/prasarana wisata, mengendalikan kegiatan pembangunan objek wisata, mendampingi setiap kegiatan mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata, dan Pemda menyikapi dan mendukung awasi kegiatan pembangunan wisata telah diwujudkan dan berada pada interval 60 – 70%.

Penilaian dan Pengambilan Keputusan Guna Menentukan Prioritas Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Memajukan Objek Pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah



Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu harapan dan capaian yang diinginkan dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sehingga pihak manajemen dituntut untuk dapat mewujudkan pengelolaan secara optimal untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang efektif dan efisien. Demikian maka secara keseluruhan untuk mencapai kejelasan konkrit sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan dilakukan pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas peningkatan dan penguatan dalam optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu harapan dan capaian yang diinginkan dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan besaran persentase Capaian Rata-rata (C_{RR}) dari Skor Akumulatif (S_A) yang dikonversikan secara Sosiometrik sesuai Indeks Status Pilihan (ISP). Demikian maka hasil konversi menunjukkan bahwa:

1. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang terfokus pada hasil merencanakan terwujudkan dengan C_{RR}, S_A 57% dinilai Kurang dan keputusan akhir yang diambil adalah dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasinya dengan ISP 0.367 prioritas I.
2. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang terfokus pada hasil mengorganisir terwujudkan dengan C_{RR}, S_A 63% dinilai Cukup dan keputusan akhir yang diambil adalah masih perlu dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasinya dengan ISP 0.428 prioritas II.
3. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang terfokus pada hasil menggerakkan terwujudkan dengan C_{RR}, S_A 66% dinilai Cukup dan keputusan akhir yang diambil adalah masih perlu dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasinya dengan ISP 0.448 prioritas III.
4. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang terfokus pada hasil mengawasi terwujudkan dengan C_{RR}, S_A 66% dinilai Cukup dan keputusan akhir yang diambil adalah masih perlu dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasinya dengan ISP 0.448 prioritas III.

Dari hasil penilaian dan pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas bagi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dimaksud, besaran nilai C_{RR}/S_A dan Nilai ISP bersifat relatif searah sesuai dengan peluang penetapan prioritas, yang dimulai dari nilai ISP yang terendah secara berurutan ke nilai ISP yang tertinggi untuk dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasi hasilnya yakni, merencanakan diprioritaskan pertama, dan mengorganisir diprioritaskan ke dua, sementara menggerakkan dan mengawasi diprioritaskan secara bersamaan sebagai prioritas ketiga dan diharapkan dalam tindak lanjutnya dapat terlaksana dengan baik guna pengembangan pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, disebabkan oleh aktor-aktor pelaksana atau pengelola yang belum merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi setiap kegiatan pengembangan pariwisata dengan baik.
2. Jika dilakukan peningkatan dan penguatan dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi setiap kegiatan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu akan memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.



3. Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu sesuai harapan dan capaian yang diinginkan dapat dilakukan melalui peningkatan dan penguatan dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan dan mengawasi setiap kegiatan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh aktor-aktor pelaksana atau pengelola dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bertumpuh pada prioritas yang telah ditentukan.
4. Faktor-faktor yang menentukan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata adalah bagian dari merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi setiap kegiatan pengembangan pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
5. Temuan penelitian ini berimplikasi secara prioritas sesuai nilai indeks status pilihan (ISP) bagi optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Rekomendasi

Saran yang dikemukakan sebagai kontribusi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis pentingnya dilakukan pendalaman pemahaman konsep teori optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan objek pariwisata secara terperinci dan dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan pengembangan yang terprosedur dan bersifat ilmiah, yang dapat bermanfaat bagi operasionalisasi dalam proses optimalisasi yang hasilnya dapat dibuktikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara empiris dan terjamin sebagai fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan dalam mendesain kerangka operasional sebagai kerangka kerja yang tersusun secara sistematis yang lebih terfokus ketepatan merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir secara optimal dalam memajukan objek pariwisata dan memenuhi harapan masyarakat pada sektor pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikampana, I. M. (2017). *In Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Denpasar: Cakra Press.
- Arfianti Nur Sa'idah, 2017, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)" *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H / 2017 M*.
- Dewi Kusuma Sari, 2011 "Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang" *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011*.
- Eppler, Mark, 2007, *57 Kesalahan Total Dalam Manajemen Yang Dapat Anda Hindari (Management Mess-Ups)*, Terjemahan Juni Prakoso, Tangerang : Kharisma Publishing Group
- Hiariey, L. S. (2013). Peran Serta Masyarakat Pemanfaat Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam. *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi*, Vol 14 No 1, hal 48 - 61.
- Meredith, Geoffrey, M., Nelson, Robert, E., Neck Philip, 2000, *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*, Seri Manajemen 97, Jakarta : Lembaga PPH.
- Muhammad Brian Adam 2018, "Strategi Pengembangan Pariwisata Pesisir Di Kawasan Taman Wisata Pantai Ngliyep Kabupaten Malang Muhammad Brian Adam" *Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2018*.
- Nasir, Moh, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.
- Nike Ika Nuzula, 2016, "Optimasi Pengelolaan Ekowisata Pesisir: Studi Kasus Pesisir Taman Nasional Baluran Indonesia," *Magister Program Coastal Engineering And Management Faculty Of Marine Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2016*.
- Pranoto, Juni dan Suprapti, Wahyu, 2003, *Membangun Kerjasama Tim*, Jakarta : LAN RI.



- Riduwan, 2003, Dasar-Dasar Statistik, Bandung: Alfabeta.
- Rullyana Puspitaningrum Mamengko¹, dan Erlina Daru Kuntari², 2020 “Pengelolaan Pariwisata Bahari Berbasis Community-Based Tourism Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir”¹ Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: rullyana.mamengko@uny.ac.id ²Akademi Pariwisata Buana Wisata Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: erlina@akparbuanawisata.ac.id ISSN 16935969, Media Wisata, Volume 18, Nomor 1, Mei 2020 EISSN 26858436.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. 2018. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 1 No 3, hal 155 - 165.
- Stoner, James A.F., R. Edward, Freeman, dan Daniel, R. Gilbert JR., 2003, Manajemen, Jilid I, Terjemahan Akexander Sindoro, Jakarta : PT. Indeks Gramedia Grup.
- Sugiono, 2004, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
- Sujana, 2004. Metode Statistika, Bandung : Tarsito.
- Sujarweni, Wiratna, V., 2014, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Terry, George, R., 2000, Asas-Asas Manajemen, Terjemahan J.Winardi, Bandung: Alumni.
- Ticoalu, D. E., Reppie, E., & Telleng, A. T. 2013. Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap di Kota Manado. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, Vol 1 No 3, hal 76 - 80.
- Tulungen, J. J. 2001. Program Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat: Telaah Kasus di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.
- Winardi, J., 2005, Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi Dan Manajemen, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2010, Asas-Asas Manajemen, Bandung: Mandar Maju.





**IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN
BULOVA KOTA MAKASSAR**

**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ADMINISTRATIVE SERVICES
(PATEN) ON THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES IN BULOVA
VILLAGE, MAKASSAR CITY**

Ahmad Rosandi Sakir¹, Humairah Almahdali²

^{1,2}Universitas Pattimura

¹ahmadrosandi8@gmail.com, ²humalume@gmail.com

Abstrak

Pelayanan kepada masyarakat sudah sepatutnya memperhatikan kualitas pelayanan karena pelayanan yang baik dari adalah awal bagi tumbuhnya trust masyarakat kepd pemerintah, yang selanjutnya akan menjadikan hal yang menjadi penentu berdayanya masyarakat. Dalam hal ini, pengukuran mengenai kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur antara pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang diterima. Penyelenggaraan pelayanan terpadu (PATEN) di kelurahan yang proses pengelolaannya, dimulai dari permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat pelayanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Lokasi dari penelitian ini bertempat di Kantor Kelurahan Bulova Kecamatan Tallo, Jalan Sultan Abdullah Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini di pilih atas dasar pertimbangan bahwa Kelurahan Bulova merupakan Instansi yang telah menerapkan kebijakan pelayanan administrasi.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan,, Pelayanan Publik, Administrasi

Abstract

Service to the public should pay attention to the quality of service because good service is the beginning of the growth of public trust in the government, which in turn will determine the determinants of community empowerment. In this case, the measurement of the quality of public services is a benchmark between the services provided and the services received. The implementation of integrated services (PATEN) in sub-districts whose management process, starting from the application stage to the document issuance stage, is carried out in one service location This research uses descriptive research methods. Descriptive research is conducted to determine the independent variable, either one variable or more, without making comparisons or connecting one variable to another. The location of this research is at the Bulova Village Office, Tallo District, Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar City, South Sulawesi Province. This location was chosen on the basis of the fact that Bulova Village is an agency that has implemented an administrative service policy..

Keywords: Service Quality, Public Service, Administration



PENDAHULUAN

Citra kurang baik pelayanan universal di Indonesia pada masa kemudian terlanjur menempel dalam benak dan dihati warga. Lambannya pelayanan, susah serta rumitnya persyaratan yang wajib dipadati serta tidak transparannya permasalahan pembiayaan memunculkan keengganan warga buat mengurus perijinan. Perihal ini pasti saja tidak menguntungkan untuk pertumbuhan serta pemberdayaan perekonomian warga, tercantum terhadap kebutuhan pelayanan, sehingga membatasi proses terwujudnya kenaikan kesejahteraan warga. Untuk pemerintah wilayah, perihal ini jadi tantangan tertentu yang wajib dituntaskan sebagaimana di amanatkan dalam Undang- undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah wilayah. Bagi undang- undang tersebut kalau salah satu dtujuan dari kebijakan Otonomi merupakan mewujudkan kenaikan pelayanan serta kesejahteraan yang terus menjadi baik kepada warga. Pelayanan yang baik ialah salah satu penanda evaluasi keberhasilan otonomi wilayah, kalau mereka sukses membangun kesejahteraan serta sudah melaksanakan pemberdayaan yang baik buat pelayanan, kesejahteraan serta kemajuan warga.(AR Sakir, 2021)

Ada pula permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan individu yang mengaitkan sedikit banyaknya polemik yang mewajibkan periset lebih cermat dalam mengambil informasi yang dibutuhkan serta lebih adil dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan latar balik permasalahan tersebut. Bersumber pada undang- undang yang disebutkan lebih dahulu, pasti membagikan sesuatu penguatan gejala kalau penyelenggaraan pelayanan kepada warga ialah guna yang wajib diemban pemerintahan dalam rangka menciptakan kesejahteraan, selaku paramter terselenggaranya tata kelola pemerintahan baik . Pintu masuk untuk percepatan data birokrasi di wilayah hendak jadi piranti serta pendukung utama

Pemerintahan di daerah dalam menciptakan pelayanan yang efektif, baik dan akuntabel sekaligus dalam rangka menjadikan kerja pemerintahan maupun kualitas pelayanan umum dapat memperbaiki proses terselenggaranya administrasi dalam pemerintahan, hingga kemajuan daerah(local development). Pelayanan pemerintahan kepada warga yang diketahui dengan pelayanan universal(Public Service) (Rapita *et al.*, 2020) pada dasarnya merupakan serangkaian layanan yang dicoba oleh aparatur pemerintahan kepada seluruh susunan warga dengan tujuan penuh seluruh kebutuhan warga, sebagaimana daerah riset pada kelurahan Buloa Kecamatan Tallo.

Titik tolak percepatan reformasi birokrasi daerah untuk mewujudkan good local governance difokuskan pada peningkatan administrasi dan pelayanan publik. Kualitas administrasi publik masih perlu ditingkatkan di berbagai daerah. Banyak faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan tersebut, seperti perilaku pensiunan pejabat, kondisi pelayanan yang tidak jelas, biaya untuk memperoleh pelayanan publik, dan lama pelayanan. Prosedur yang harus diikuti dalam memberikan pelayanan publik.

Peranan kelurahan selaku penyelenggara negeri serta selaku pusat pelayanan warga jadi relevan apabila dilihat jarak, kecepatan waktu, serta mutu pelayanan yang diberikan dan tanggung jawab yang menghasilkan kepuasan layanan atas warga. (Novia Tumilantouw, Mandagi and Bogar, 2019)Meski pasti tidak bisa dipungkiri pula terdapatnya bermacam kelemahan, yang berimplikasi atas keluaran warga.

Berbagai keluhan dimaksudkan dan dirasakan oleh masyarakat, terutama terhadap pelayanan melalui metode kuno ternyata menjadikan berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat, sebagaimana dalam sebuah pandangan antara lain:

1. Kurangnya penyelesaian tepat waktu dari file yang diminta oleh masyarakat.
2. Warga harus bolak-balik ke kantor karena informasi layanan tidak dipublikasikan.
3. Jumlah pembayaran yang akan diberikan sebagai imbalan atas layanan tidak transparan.
4. Beberapa kesalahan terjadi saat menulis file komunitas.
5. Pejabat yang melayani masyarakat cenderung kurang menyadari kedudukan dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.



Melihat masalah tersebut, hendaknya perlu diadakan perubahan dalam badan serta system birokrasi. Meninggalkan birokrasi lama yang sifatnya kaku, tidak fleksibel, sebagaimana sistem konvensional, kemudian memulai pada tahap birokrasi yang lebih efisien dan efektif dengan mengganti metode pelayanan yang sebelumnya dengan cara dan sistem konvensional, kemudian sistem pengelolaan pemerintahan yang baru, lebih baik dan lebih akuntabel, yakni dengan menggunakan metode PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu),

Pendekatan PATEN merupakan kebijakan makro yang bersumber dari pusat dan dilaksanakan secara mendalam di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pendekatan ini (PATEN), mempermudah dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terutama pada hari dan jam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan Metode PATEN, pelayanan skala kecil berizin dan tidak berizin, masyarakat tidak perlu lagi ke kantor jalan karena Metode PATEN menghemat waktu dan biaya untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan masyarakat. (Ali dan Saputra, 2020) Dalam hal pelayanan, dan dorongan menuju pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good government and clean governance), sebagai kebutuhan dasar warga negara terhadap pelayanan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. (Ali and Saputra, 2020).

Manfaat yang cukup besar yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Buloa melalui Metode PATEN adalah selain mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang cukup prima, juga dengan mudah, baik dan memperlancar seluruh procedural administrasi, sehingga efektivitas dan efisiensi dirasakan pula, terutama waktu kepengurusan yang relative singkat, biaya dalam kepengurusan layanan administrasi yang relative kurang, serta ikut merasakan nilai manfaat PATEN dalam melakukan akuntabilitas oleh aparat pemerintahan Kelurahan Buloa dan sebagai implikasi kilas baliknya, masyarakat akhirnya juga merasa mendapatkan pelayanan yang baik, sehingga pada gilirannya masyarakat juga merasa harus ikut membantu pemerintah untuk kelancaran berbagai aktifitas dan program pemerintah Kelurahan Buloa termasuk gerakan kesadaran pembayaran pajak-pajak dan berbagai aktifitas yang mendukung program dan kemajuan pemerintahan. (Alifia, 2021)

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan variabel-variabel bebas, baik satu atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan variabel secara bersama-sama.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Jalan Sultan Abdullah Raya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa Desa Buloa merupakan instansi yang menerapkan kebijakan pelayanan administrasi.

Penulis memilih pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan fakta atau peristiwa secara sistematis dan akurat tentang sifat populasi atau wilayah tertentu, yaitu. H. memberikan fakta tentang kualitas layanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kualitas pelayanan merupakan dasar utama untuk menentukan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini apabila Desa dapat menyediakan barang atau jasa sesuai dengan keinginan pelanggan atau pihak yang dilayani maka dapat dikatakan baik. Kualitas kinerja pelayanan yang baik akan sangat mempengaruhi peningkatan kepuasan pelanggan. Kualitas layanan bisa disebut kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dinilai baik dan memuaskan apabila pertanyaan ini diperoleh dengan menyamakan persepsi konsumen terhadap pelayanan yang diterimanya, dan kualitas pelayanan dinilai baik dan memuaskan apabila pelayanan yang diterima melebihi harapan konsumen. Kualitas dinilai sangat baik dan bermutu tinggi ..(Sakir and Pattimura, 2022) Kebalikannya bila jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, hingga mutu pelayanan dipersepsikan kurang baik.



Pelayanan universal ialah sesuatu aktivitas yang mengaitkan minimum 2 orang ialah pihak yang dilayani serta pihak yang melayani. Pihak yang dilayani kerap diucap dengan pelanggan, sebaliknya pihak yang melayani diucap dengan pelayan.

Mutu pelayanan merupakan wujud keseluruhan pelayanan yang dicoba oleh aparaturnegeri secara optimal cocok dengan ketentuan pokok serta tata metode yang ditetapkan serta bisa sediakan jasa bersumber pada kesesuaian dalam rangka penuh kepuasan, kebutuhan serta harapan warga selaku penerima. (Latupeirissa, 2022) Kualitas adalah kondisi dinamis yang memengaruhi layanan, orang, proses, dan area yang memenuhi atau melebihi harapan. Definisi pelayanan adalah setiap gerak konsumen disertai dengan hati yang tulus, dan tidak ada yang hanya memihak satu pelanggan saja. Pelayanan adalah sikap yang dianut oleh produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta untuk mencapai kepuasan konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa sikap ini dapat terjadi baik sebelum maupun sesudah layanan didirikan.

Ditinjau dari prosesnya, hingga dalam pelayanan universal terjalin interaksi antara yang membagikan pelayanan dengan yang menerima pelayanan. Dalam rangka mewujudkan interaksi yang silih menguntungkan dalam penyelenggaraan pelayanan, hingga dibutuhkan serangkaian aksi yang dalam teori diketahui dengan manajemen mutu pelayanan. (Sakir and Mustari, 2022) Manajemen mutu pelayanan pada dasarnya ialah strategi kerjasama antara bagian operasional buat membagikan layanan sehingga memuaskan pelanggan. Sehubungan dengan kualitas pelayanan, dalam hal ini penulis menentukan beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan umum di Kantor Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Pembahasan

1) Apakah Kantor Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dapat meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum?

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur merupakan serangkaian metode atau arah penyelesaian yang telah menjadi gambaran tetap dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Atau dapat dikatakan bahwa prosedur adalah serangkaian tugas yang sistematis dan saling terkait satu sama lain sebagai cara atau metode dalam menjalankan suatu tugas sesuai dengan pertauran yang berlaku untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Ali and Saputra, 2020) Sedangkan Pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui aktivitas fisik yang bersifat pribadi yang diberikan oleh petugas secara langsung yang bertujuan untuk pencapaian kepuasan para pelanggan. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu division atau lebih yang disebut untuk menjamin penanganan secara seragam. Dalam prosedur pelayanan ini, penulis memilih proses pembuatan surat izin KK dan KTP. Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo.

''Harus mempunyai surat pengantar dari RT/RW agar kita bisa mengetahui bahwa yang bermohon betul-betul warga setempat atau warga asli dari Kelurahan Buloa dan setelah itu harus mengisi blangko, dari blangko itulah tercantum apa saja yang diperlukan dan dengan blangko itulah yang akan di bawah ke Kantor Camat untuk di tindak lanjuti''

(Wawancara dengan Bapak ODDANG NAI, S.sos Lurah kantor Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar, 4 Januari 2023).

Berdasarkan jawaban informan dapat diketahui bahwa prosedur pelayanan pembuatan surat izin KK dan KTP Kantor Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dengan mempunyai surat pengantar terlebih dahulu dari RT/RW setempat kemudian akan di proses di kelurahan dan ditindak lanjuti di kecamatan.



b. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu badan usaha karena masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkannya. (Ratnasari, Nempung and Suriadi, 2016) Hal ini didukung oleh pernyataan Hoffman dan Beteson (1997) yaitu:

"Tanpa pelanggan, perusahaan jasa tidak akan ada." Definisi kepuasan masyarakat menurut Mowen (1995): "Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai keseluruhan sikap terhadap suatu produk atau jasa setelah pembelian dan penggunaan". Oleh karena itu pengusaha harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan masyarakat agar tercapai kepuasan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat. Kepuasan masyarakat hanya dapat dicapai melalui pelayanan yang berkualitas kepada konsumen. Masyarakat atau konsumen sering mengapresiasi pelayanan yang baik secara langsung dari pegawai sebagai penyedia jasa atau disebut juga sebagai penyedia jasa, sehingga harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan yang ditawarkan untuk memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Oleh karena itu kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk mencapai kepuasan masyarakat. Kualitas mendorong konsumen untuk membangun hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, keterkaitan ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, dan kepuasan tersebut pada gilirannya dapat menciptakan loyalitas/kesetiaan pada masyarakat. Kepuasan masyarakat merupakan hasil opini dan evaluasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan terhadap mesin penyelenggara pelayanan publik.

''Kalau untuk pelayanannya menurut saya bagus karena sudah sesuai dengan prosedur cuman pada waktu itu saya menunggu sedikit lebih lama.''

(Wawancara dengan Bapak Agung Syaifullah masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar, 4 Januari 2023).

''Waktu pertama kali itu mengurus surat izin pembuatan KTP sangat lama yah karena saya juga waktu itu berkasnya belum lengkap jadi harus menunggu lagi tapi setelah pengurusan surat izin pembuatan KTP yang kedua karena KTP yng pertama saya hilang,, itu sudah cepat pengurusannya. Kalau masalah pengurusan pembuatan surat izin KK Alhamdulillah sudah cepat, ''

(Wawancara dengan Bapak Sadikul Fajrin masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar, 4 Januari 2023).

''Kalau pembuatan surat izin pembuatan KTP dan KK di kantor kelurahan, saya langsung di kasih surat pengantar dan langsung dilayani.''

(Wawancara dengan Ibu Arliana masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar, 4 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara dari beberapa masyarakat, penulis menyimpulkan bahwa lambat tidaknya pengurusan surat izin tergantung kelengkapan berkas yang diterima.

c. Kedisiplinan

Pemahaman tradisional tentang disiplin memberikan arti bahwa penghargaan adalah hadiah terbaik untuk membantu seseorang menjadi lebih baik. Dan salah satu prinsip yang membentuk disiplin adalah memberikan pemahaman kepada seseorang untuk melakukan hal yang baik sehingga mereka memiliki rasa nyaman dan tenang dalam melakukan sesuatu dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Soegeng Prijodarminto, SH. Dalam bukunya, Disiplin Kiat Sukses, disiplin diartikan sebagai situasi yang diciptakan dan dibentuk oleh suatu proses pola tingkah laku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan/atau keteraturan. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari perilaku hidupnya. Perilaku ini



muncul melalui keluarga, pendidikan, dan pengalaman melalui proses promosi (Priodarminto, 1994:23). Ketertiban adalah ciri organisasi dan disiplin memaksimalkan efisiensi. Keadaan diciptakan dan dibentuk oleh berbagai perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban. (Priodarminto, 1994:23).

Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin. Kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan dan ketertiban. (Kolaborasi *et al.*, 2019) Disiplin dalam bekerja dalam pelaksanaan tugas sangat mempengaruhi hasil kerja pegawai.

“Sekarang itu kalau kita berbicara kedisiplinan sudah pasti disiplin apalagi sekarang sudah ada absensi eNiaja harus absensi wajah sehingga sangat berpengaruh cuman kalau masalah ketepatan waktu masih ada yang telat datang seperti yang seharusnya datang jam 7:30 contohnya kalau untuk ibu rumah tangga, biasa datangnya jam 8 tapi itu sudah jarang terjadi dan kalau masalah kehadiran dalam 1 bulan pasti kehadirannya baik”

(Wawancara dengan Bapak ODDANG NAI, S.sos Lurah kantor Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar, 4 Januari 2023).

Berdasarkan informan diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu mengenai kehadiran masih kurang dikarenakan adanya urusan pribadi terutama pada staf yang memiliki status IRT namun dalam kehadiran sebulan para pegawai memiliki kehadiran yang baik.

d. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian tugas pelayanan adalah waktu suatu pelayanan umum mulai dari dilengkapinya persyaratan berkas maupun teknis dan administrasi hingga selesainya suatu proses pelayanan.

“Paling cepat 5 menit kalau berkasnya lengkap seperti surat pengantar, PBB dan kami akan segera memproses.”

(Wawancara dengan Ibu Rosmiati staf kantor Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar, 4 Januari 2023).

Berdasarkan informan diatas disimpulkan bahwa ketepatan waktu penyelesaiannya efisien dan hal ini dipengaruhi oleh kelengkapan berkas yang diterima.

e. Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang menunjang keberhasilan proses kerja yang dilakukan dalam pelayanan, karena jika kedua hal tersebut tidak ada maka tidak semua kegiatan yang dilakukan akan mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana. Tempat adalah segala macam peralatan, perkakas dan bangunan yang berfungsi sebagai sumber daya kerja utama/ sampingan dan juga bagian dari utilitas organisasi kerja. Sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam proses operasional, baik alat bantu maupun alat utama. “Sangat baik dan lengkap.”

(Wawancara dengan Ibu Ahli Musdalifa staf kantor Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar, 4 Januari 2023).

Berdasarkan informan diatas disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki kantor kelurahan dapat menunjang ketepatan waktu dalam bekerja.

2) Sejauh mana peran aparat pemerintahan terhadap pelayanan masyarakat melalui implementasi sistem PATEN (Pelayanan Terpadu) di Kelurahan Buloa?

Implementasi sistem PATEN (Pelayanan Terpadu) di Kelurahan Buloa Kota Makassar terlihat dari sifat perubahan yang termasuk dalam PATEN (Pelayanan Terpadu), seperti: B. standar pelayanan, biaya, kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat. Kehadiran PATEN (Pelayanan Terpadu) tidak hanya membawa



perubahan pada proses pelayanan, tetapi juga pada bidang lainnya. Seperti pada standar pelayanan yang menjamin keselamatan dalam hal waktu pelayanan. Kemudian kualitas Sumber Daya Manusia atau Pengelola Desa, baik dalam memberikan pelayanan maupun menunjukkan sikap yang baik kepada pelanggan. (Ferezegia, 2018) Selain itu melalui konsep PATEN (Pelayanan Terpadu) turut menambah kualitas pelayanan.

Dari pengaruh yang dirasakan masyarakat terhadap pelaksanaan program PATEN (Pelayanan Terpadu) di Kantor Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik yang diterimanya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat. Walaupun sebenarnya masyarakat tidak mengetahui tentang program PATEN (Pelayanan Terpadu) itu sendiri karena belum dilakukan sosialisasi, namun masyarakat sudah dapat merasakan dampak PATEN (Pelayanan Terpadu) secara langsung melalui pelayanan yang diterima. Melalui PATEN (Pelayanan Terpadu), masyarakat merasa puas tidak hanya dengan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) atau Pengelola Pelayanan dalam memberikan proses pelayanan, tetapi juga dengan aspek lain, seperti fasilitas. dan infrastruktur di ruang pelayanan.

KESIMPULAN

- 1) Upaya peningkatan Kualitas Pelayanan Umum pada Kantor Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar secara umum dinilai dari aspek Prosedur Pelayanan, Kepuasan Masyarakat, Kedisiplinan, Waktu Penyelesaian dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana sudah dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum karena sudah diterapkannya sistem PATEN (Pelayanan Terpadu) pada Kelurahan Buloa. Hal ini terlihat dari lengkapnya sarana dan prasarana dan meningkatnya kinerja pegawai serta rasa puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan di keluraha Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar.
- 2) Peran aparat pemerintahan terhadap pelayanan masyarakat melalui implementasi sistem PATEN (Pelayanan Terpadu) di Kelurahan Buloa Kota Makassar dapat dilihat melalui sifat perubahan yang terdapat dalam PATEN (Pelayanan Terpadu) itu sendiri seperti pada standar pelayanan, biaya, kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. and Saputra, A. (2020) 'Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar',
Warta Dharmawangsa, 14(4), pp. 602–614. doi:10.46576/wdw.v14i4.891.
- Alifia, M. (2021) 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', 7(10), p. 6.
- AR Sakir, A.R. (2021) 'Budaya Birokrasi : Kinerja Pegawai Samsat Maros dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor',
- Ferezegia, D. (2018) 'Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan', *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1)
- Latupeirissa, J.J.P. (2022) 'Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia: Inkonsistensi Pemerintah Pusat Dan Daerah', *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(2), p. 324. doi:10.31604/jim.v6i2.2022.324-330.
- Novia Tumilantouw, Mandagi, M. and Bogar, W. (2019) 'Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Optimization', *Jurnal Mirai Management*, 4(2),



pp. 122–136.

Rapita, D.D. *et al.* (2020) ‘Pemanfaatan Website Pemerintah Desa Kecamatan’, *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, 3(2), pp. 61–67.

Ratnasari, Nempung, T. and Suriadi, L.O. (2016) ‘Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara’, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), pp. 82–95.

Sakir, A.R. and Mustari, S.H. (2022) ‘Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros’, 5(1), pp. 14–22.

Sakir, A.R. and Pattimura, U. (2022) ‘TENGAH EMPOWERMENT OF THE POOR BY THE SOSIAL WELFARE OFFICE IN LETWARU VILLAGE , MASOHI DISTRICT , CENTRAL MALUKU

Utami, T.S. (2021) ‘Optimalisasi Pelayanan Publik Selama Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Clean and Good Governance Di Kota Semarang’, *Jurnal JURISTIC*, 2(01), p. 31.
doi:10.35973/jrs.v2i01.2047.





Published by:
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pattimura

ISSN 2985-637X (Print) ISSN 2985-6361 (Online)

ISSN 2985-637X ISSN 2985-6361

9 772985 637007 9 772985 636000